BERTINDAK DENGAN TEPAT

Kristen Evans
Iliana Monterroso
Douglas B. Ombogoh
Nining Liswanti
Ade Tamara
Harlem Mariño
Juan Pablo Sarmiento
Anne M. Larson

PANDUAN UNTUK MENINGKATKAN
INKLUSI DALAM FORUM MULTIPihak

BERTINDAK DENGAN TEPAT

**Kristen Evans
Iliana Monterroso
Douglas B. Ombogoh
Nining Liswanti
Ade Tamara
Harlem Mariño
Juan Pablo Sarmiento
Anne M. Larson**

**PANDUAN UNTUK MENINGKATKAN
INKLUSI DALAM FORUM MULTIPIHAK**

BERTINDAK DENGAN TEPAT

PANDUAN UNTUK MENINGKATKAN
INKLUSI DALAM FORUM MULTIPIHAK

© 2021 oleh Center for International Forestry Research.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Isi publikasi ini berlisensi di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ISBN: 978-602-387-169-8
DOI: 10.17528/cifor/008332

Evans K, Monterroso I, Ombogoh DB, Liswanti N, Tamara A, Mariño H, Sarmiento JP dan Larson AM. 2021.
Bertindak dengan cepat, panduan untuk meningkatkan inklusi dalam forum multipihak. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Terjemahan dari: Evans K, Monterroso I, Ombogoh DB, Liswanti N, Tamara A, Mariño H, Sarmiento JP and Larson AM. 2021. *Getting it right, a guide to improve inclusion in multi-stakeholder forums*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Koordinator Visual dan Editorial CIFOR: Yoly Gutierrez
Desain oleh Negrapata S.A.C.

Center for International Forestry (CIFOR)
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia

T +62 (251) 8622-622
F +62 (251) 8622-100
E cifor@cgiar.org
www.cifor.org

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini berasal dari penulis. Ini bukan merupakan pandangan dari CIFOR, para editor, lembaga asal penulis, penyandang dana atau para pengulas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pekerjaan ini dilakukan sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR tentang Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (PIM), yang dipimpin oleh Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI), dan Program Penelitian CGIAR tentang hutan, pepohonan dan wanatani, yang dipimpin oleh CIFOR. Publikasi ini telah melalui prosedur standar tinjauan sejawat oleh CIFOR. Kami berterima kasih kepada *Rights and Resources Initiative* yang telah mendukung penelitian ini dan para staf *Rights and Resources Initiative* untuk keterlibatan mereka pada semua tahapan studi. Proyek ini terkait dengan kegiatan yang didukung oleh Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad).

Kami khususnya berterima kasih kepada sejumlah organisasi yang telah berpartisipasi dalam studi ini dan telah berbagi wawasan yang berharga tentang berbagai tantangan dan cerita keberhasilan yang mendorong peningkatan gender dan hasil inklusi sosial dalam forum multipihak. Para penyelia bahasa yang memberikan tanggapan dan masukan, termasuk: Asiku Micah (*Community Development and Conservation Agency* – CODECA), Abraham Nkuruna (*Narok County Natural Resource Network* – NCNRN), Adam Ole Mwarabu, (*Parakuiyo Pastoralists Indigenous Community Development Organisation* – PAICODEO), Albert Katako (*Civic Response*), Anne Kamau, dan Rahma Kivugo (*Mikoko Pamoja*), Bernard Baha (*Tanzania Land Alliance* – TALA), Cécile Bibiane Ndjebet (*African Women's Network for Community Management of Forests* – REFACOF), Concepta Mukasa (*Association of Uganda Professional Women in Agriculture and Environment* – AUPWAE), Daniel Kobei (*Ogiek Peoples Development program* – OPDP), Daniel Ouma (*Tanzania Natural Resource Forum* – TNRF), Gerald Ngatia (*National Alliance of Community Forest Associations* – NACOF), John Leckie (DAI), Zake Joshua (*Environment Alert*), Steven Cole (IITA), Suzane Irau (*Land and Equity Movement Uganda* – LEMU), Tereza Getahun (*Pastoralist Forum Ethiopia* – PFE), Álvaro Acevedo (*Red Nacional de Agricultura Familiar* – RENAF), Breny Herrera (*Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas* – RECMURIC), Eileen Mairena Cunningham (*Organización de Mujeres Indígenas Wangki Tangni*), Fany Kuiru Castro (*Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la*

Amazonía Colombiana – OPIAC), Gustavo Sánchez (*Mexican Network of Rural Forest Organization* – RED MOCAF), Judith Walcott (ONUREDD+), Luisa Lozano (*Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador* – CONAIE), María Alejandra Rodríguez Acha (*Fondo Feminista Joven FRIDA*), Margarita Florez (*Environment and Society Association*), María Teresita Chinchilla Miranda (*Asociación de Unidades Forestales de Petén* – ACOFOP), Melania Canales (*National Organization of Indigenous, Andean and Amazonian Women of Peru* – ONAMIAP), Telma Taurepang (*Union of Indigenous Women of the Brazilian Amazon* – UMIAB), Valeria Urbina (*Law, Environment and Natural Resources* – DAR), Vilma Mendoza (*National Confederation of Indigenous Women of Bolivia* – CNAMIB), Yohanka Valdes (*Gender Justice and Women's Rights Program, Oxfam*), Andhika Vega Praputra (*Samdhana Institute*), Bharati Pathak (FECOFUN Nepal), Dr Kevin Jeanes, Chanthaphone Thammavong, Sitthideth Abhay, Pany Vanmanivong (Proyek *Climate Change Adaptation in Wetlands Areas in Lao PDR* (CAWA), Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO), didanai oleh *Global Environment Facility* (GEF), Dharm Raj Joshi (*International Land Coalition*, NES Nepal), Dian Ekowati (CIFOR), Ellen Dictaan (*Tebtebba – Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education*), Gamma Galudra (RECOFTC), Ishan Agrawal (FES), Ly Thi Minh Hai (RECOFTC), Mia Siscawati (Universitas Indonesia), Pasang Dolma (CIPRED Nepal), Pratiti Priyadarshini (FES), Reonaldus Paembonan (Dewan Daerah Perubahan Iklim - DDPI), Shambu Dangal (RECOFTC), Subekti Rahayu (ICRAF), Swapna Sarangi (FES), Tini Gumartini (*World Bank*), Tran Nhat Lam Duyen (*School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University, Hanoi* – VNU), Agnieszka Kroskowska (Helvetas), Alain Frechette (Rights and Resources Initiative), David Alejandro Rubio (*International Land Coalition*), Elisabetta Cangelosi (*International Land Coalition*), Joao Montalvao (*Africa Gender Innovation Lab* dari *World Bank*), Margaux Granat (*EnGen Collaborative*), Mathurin Zida (CIFOR), Natalie Elwell (*World Resources Institute*), Patricia Van de Velde (*World Bank, Food and Agriculture Practice*), Ruth Meinzen-Dick (*International Food Policy Research Institute* – IFPRI), dan Sylvia Cabus (USAID).

INDEKS

ISTILAH KUNCI/GLOSARIUM

hal. 6

1

PENGANTAR

Untuk apakah panduan ini dibuat?
Siapa yang menjadi fokus panduan ini?
Bagaimana panduan ini dibuat?
Membingkai panduan menggunakan pendekatan berbasis hak

hal. 8 - 23

2

PERANGKAT

Perangkat untuk mobilisasi struktur
Perangkat untuk mengungkap kapasitas

hal. 24 - 41

3

MEMBUATNYA BEKERJA

Bagaimana menyelenggarakan MSF yang inklusif
Mendukung dan melatih pemimpin perempuan
dan kelompok perempuan
Pelatihan, persiapan dan peningkatan kapasitas
Komunikasi dan teknologi
Menghasilkan dampak

hal. 42 - 48

4

PERANGKAT DAN SUMBER INFORMASI TAMBAHAN

hal. 49

5

REFLEKSI

Apa yang telah kita pelajari tentang inklusi
Langkah selanjutnya

hal. 50 - 51

REFERENSI

hal. 52

LAMPIRAN

hal. 54 - 63

Lampiran 1. Daftar artikel yang ditinjau untuk panduan ini

Lampiran 2. Daftar orang yang diwawancarai yang dikonsultasikan untuk panduan ini

ISTILAH KUNCI/GLOSARIUM

- **Forum Multipihak** (*multi-stakeholder forum*, MSF) adalah “suatu proses interaktif yang secara khusus diselenggarakan, yang menyatukan beragam multipihak untuk berpartisipasi dalam dialog dan/atau pembuatan keputusan dan/atau implementasi tindakan yang berupaya mengatasi suatu masalah bersama atau untuk mencapai suatu tujuan untuk manfaat bersama.” (Sarmiento Barletti dkk. 2020b, 2).
- **Gender** mengacu pada hubungan berdasarkan jenis kelamin biologis dalam masyarakat, juga bagaimana relasi tersebut dibentuk, ditentang dan diinternalisasikan (Nightingale 2011). Dalam panduan ini, kami menindaklanjuti pengalaman gender perempuan dalam MSF, baik sebagai individu maupun kelompok.
- **Inklusi** adalah “proses memperluas partisipasi masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki keuntungan melalui penguatan peluang, akses terhadap sumber daya, suara dan penghormatan terhadap sejumlah hak” (UN 2016, 17). Dalam konteks MSF, inklusi berarti memastikan bahwa tidak ada kerangka kerja kelembagaan, norma budaya atau bentuk identitas yang secara tidak adil memengaruhi proses pembuatan keputusan atau mengecualikan orang-orang untuk secara aktif terlibat dan efektif berpartisipasi dalam keputusan yang berdampak terhadap mereka.
- **Masyarakat Adat**¹ memiliki pengakuan internasional yang mendasari klaim dan ruang perwakilan mereka di forum-forum keputusan publik yang beragam, dari skala lokal sampai global (UNPFII 2020). Hak-hak tersebut telah diformalkan dalam Konvensi 169 *International Labour Organisation* tahun 1989 dan Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples*, UNDRIP) tahun 2007, yang menyerukan pengakuan masyarakat adat dalam ruang tata kelola formal.
- **Kelompok yang kurang terwakili** termasuk subkelompok yang secara historis tidak memiliki pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan pada konteks tertentu. Ini bisa jadi termasuk perempuan, masyarakat adat, orang miskin, orang tua, kaum muda, keturunan Afrika, penggembala, komunitas LGBTI, penyandang ketunaan, masyarakat kasta rendah, agama minoritas, dan lain-lain. Penting untuk mempertimbangkan bahwa ketidakterwakilan memiliki beragam tingkat, mulai dari pengecualian langsung hingga keterwakilan yang kurang bermakna.
- **Faktor-faktor keberhasilan** termasuk kondisi pemungkin, karakteristik, kegiatan, perilaku atau peristiwa yang mendorong inklusi perempuan dan orang-orang yang kurang terwakili serta gagasan, nilai, pengetahuan dan prioritas mereka dalam MSF secara berarti, termasuk proses dan kegiatan pembuatan keputusan.
- **Pendekatan berbasis hak** mengacu pada prinsip bahwa semua orang dilahirkan dengan hak atas martabat, kebebasan, kesetaraan, keamanan dan standar hidup yang memadai (Shankor 2014). Sebuah pendekatan berbasis hak menempatkan orang-orang dan kelompok yang kurang terwakili sebagai pusat dari upaya-upaya pembangunan, menempatkan mereka sebagai agen aktif dalam proses yang berdampak bagi kehidupan mereka (Broberg dan Sano 2018). Dengan demikian, pendekatan berbasis hak mengatur ulang peran negara dari mitra-mitra pembangunan menjadi pemangku kewajiban yang akuntabel dan transparan; serta bagi warganya dari penerima manfaat pasif menjadi pemegang hak yang diberdayakan (Hamm 2001; Molyneux dan Lazar 2003; Nelson dan Dorsey 2018).

1 Untuk tujuan panduan ini, kami tidak mendefinisikan Masyarakat Adat, karena ini adalah topik yang kompleks. Untuk diskusi lebih lanjut tentang identitas Adat, lihat Lembar Fakta Forum Tetap PBB tentang Isu-Isu Adat (UNPFII 2020).

- **Pemegang hak (*rights-holders*) dan pemangku kewajiban (*duty-bearers*)** memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mendorong pemenuhan hak-hak mereka dan hak-hak orang lain dalam pendekatan berbasis hak. Pemegang hak perlu bekerja untuk mendorong, mempertahankan dan memenuhi klaim mereka atas hak dan kebebasan. Pemangku kewajiban adalah individu, kelompok dan organisasi yang bertanggung jawab untuk memegang dan memungkinkan realisasi hak; mereka berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak pihak lain (Sen 2004; Broberg dan Sano 2018). Semua manusia adalah pemegang hak, dan orang dapat menjadi pemegang hak maupun pemangku kewajiban, bergantung pada konteks, isu dan relasi yang berlaku.
- **Kapasitas** termasuk kemampuan, kesadaran dan motivasi para pemegang hak untuk mengambil haknya. Ini termasuk kapasitas pemangku kewajiban untuk bekerja agar memenuhi hak para pemegang hak.
- **Struktur** termasuk struktur sosial dan proses-proses politik, ekonomi dan kelembagaan yang menentukan lingkungan pemungkin/ penghambat yang memungkinkan pemangku kewajiban untuk memenuhi kewajiban, juga proses-proses yang menentukan keterwakilan pemegang hak serta pengakuan dan redistribusi hak dan manfaat.
- **Teori Perubahan (*Theory of Change, TOC*)** adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi tujuan dan selanjutnya menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

PENGANTAR

The background features a gradient of pink and purple hues. Below the title, there are stylized, wavy lines in shades of brown and maroon, resembling a landscape or a textured surface. A white line graphic, consisting of a horizontal line and a vertical line forming a corner, is positioned on the left side of the page.

UNTUK APAKAH PANDUAN INI DIBUAT?

Panduan ini menjelaskan bagaimana mengoperasionalkan pelibatan perempuan, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok kurang terwakili lainnya ke dalam forum multipihak (*multi-stakeholder forums*, MSF).

MSF telah dipromosikan dan diadopsi sebagai platform pengambilan keputusan, konsultasi dan dialog di seluruh dunia pada berbagai skala, dari negosiasi perubahan iklim global hingga keputusan penggunaan hutan lokal (Hart dkk. 2014; Sarmiento Barletti dkk. 2020b). Terdapat berbagai bentuk MSF: sebagai pertemuan, konferensi, kongres dan pertemuan tingkat tinggi. MSF juga dapat memiliki sebutan yang berbeda: platform, proses, kemitraan, kelompok kerja sektoral dan jaringan. MSF dapat bertemu satu atau beberapa kali. Secara umum, MSF bertujuan untuk menyatukan berbagai konstituen untuk berbagi ide dan pendapat, merumuskan keputusan dengan cara yang lebih terbuka dan berkesetaraan, serta mempromosikan dialog yang lebih inklusif dan horizontal daripada pengambilan keputusan dan ruang koordinasi yang konvensional (Kusters dkk. 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara dan pendukung MSF meyakini bahwa forum mereka mendorong kesetaraan hanya dengan mengundang lebih banyak aktor-aktor yang kurang terwakili ke

forum; namun mereka hanya melakukan sedikit upaya dalam menindaklanjuti ketidaksetaraan kekuasaan di antara peserta serta kualitas partisipasi dan representasi kelompok-kelompok kurang terwakili secara historis (Sarmiento Barletti dkk. 2020b). Tidak mengejutkan, bahwa perempuan dan kelompok-kelompok seperti masyarakat adat dan penduduk setempat sering kali tidak terwakili atau tidak memiliki pengaruh pada proses-proses penting dan hasil dari MSF. Keterwakilan yang tidak efektif berarti bahwa opini, nilai-nilai dan pengetahuan mereka tidak diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, dan mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat dari keputusan yang dibuat oleh MSF. Partisipasi mereka bisa jadi digunakan untuk melegitimasi hasil atau kesepakatan yang bertentangan dengan prioritas, dan mereka mungkin bahkan dirugikan, karena ketidaksetaraan tetap ada. Di sisi lain, MSF menghadirkan peluang unik untuk memanfaatkan pengaruh orang-orang yang kurang terwakili dan memengaruhi perubahan pada arena yang lebih luas. Ini adalah tantangan utama jika kita ingin memanfaatkan potensi untuk proses dan hasil yang lebih berkesetaraan. Bagaimana kita dapat meningkatkan pelibatan dan dampak perempuan, masyarakat adat dan kelompok kurang terwakili lainnya dalam MSF?

Bertindak dengan tepat mengatasi tantangan ini dengan menyediakan beberapa perangkat untuk mengoperasionalkan inklusi pada titik-titik pemicu tertentu di mana suatu aksi bekerja paling efektif.

Bertindak dengan tepat mengatasi tantangan ini dengan menyediakan beberapa perangkat untuk mengoperasionalkan inklusi di titik-titik pemicu tertentu di mana suatu aksi bekerja paling efektif. Panduan ini ditujukan untuk penyelenggara, pelaksana, partisipan, dan penyandang dana MSF pada tingkat subnasional dan nasional (pendekatan ini juga dapat berlaku pada tingkat global). Panduan ini juga ditujukan kepada anggota dari kelompok kurang terwakili, dan memberikan mereka pengetahuan dan alat untuk memastikan tanggung jawab para praktisi dan penyelenggara MSF ketika mereka berupaya untuk menegaskan hak-hak mereka dan memperbesar pengaruh mereka dalam MSF. Kita tahu bahwa aktor dan organisasi sering terlibat dalam berbagai forum pada tingkat yang berbeda, dan individu sering memainkan beragam peran dalam MSF yang sama. Panduan ini bermaksud untuk memperlengkapi aktor-aktor tersebut dengan perangkat untuk memengaruhi perubahan dalam keragaman peran mereka. Tujuan kami dengan panduan ini adalah untuk menyajikan gagasan, bukan solusi; tantangan inklusi sangat rumit dan unik bagi setiap MSF.

Perbedaan dalam forum multipihak (MSF)

Tujuan

Tujuan MSF dapat mencakup gabungan dari berikut ini: mengidentifikasi tujuan, menyusun rencana, membuat strategi, merumuskan kebijakan, bertukar informasi, memperkuat jaringan, konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

Skala temporal

Durasi MSF dapat bervariasi, dari satu kali, pertemuan *ad hoc* hingga pelibatan melalui banyak pertemuan selama beberapa tahun. Sementara beberapa strategi inklusi perlu waktu, terdapat banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendukung inklusi bahkan hanya oleh pertemuan satu kali.

Skala tata kelola

MSF bisa jadi melibatkan pemangku kepentingan pada tingkat lokal, subnasional, nasional, regional atau global. Beberapa MSF didesain untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam struktur multitingkat.

Fase

Secara umum, MSF memiliki beberapa fase operasi – desain, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ada peluang di setiap fase ini untuk mengatasi inklusi.

SIAPA YANG MENJADI FOKUS PANDUAN INI?

Terdapat banyak kelompok dan individu yang sering tidak memiliki suara atau pengaruh yang setara dalam mekanisme pembuatan keputusan dan proses konsultasi MSF. Ini mungkin termasuk perempuan, masyarakat adat, orang miskin secara ekonomi, orang tua, kaum muda, keturunan Afrika, penggembala, para transgender, penyandang ketunaan, kelompok kasta yang kurang beruntung dan populasi pedesaan. Identitas yang berbeda ini juga saling bersinggungan, misalnya seorang perempuan berkasta rendah atau laki-laki adat keturunan Afrika. Identitas bersifat kompleks dan unik bagi setiap orang. Setiap MSF, bergantung pada tujuan dan pemangku kepentingannya, akan memiliki serangkaian tantangan yang unik bagi inklusi yang mencerminkan konteks tempat mereka dibentuk.

Bertindak dengan tepat berfokus pada inklusi perempuan dan masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola. Secara khusus, kami menganalisis bagaimana aktor-aktor tersebut berpartisipasi dan/atau diwakili dalam ruang seperti komite kelompok pengguna hutan, kelompok pengelolaan bersama atau pertemuan meja bundar komoditas hutan.

Dari semua kemungkinan kelompok yang kurang terwakili, kami memilih perempuan dan masyarakat adat karena tantangan yang mereka hadapi mewakili berbagai kesulitan untuk mencapai inklusi yang berkesetaraan dalam MSF. Sementara aktor lain akan memiliki tantangan unik mereka sendiri, mereka juga memiliki penghambat dan peluang yang sama bagi inklusi. Kami juga merasa bahwa mencermati inklusi perempuan dan masyarakat adat dapat memperjelas dua skala identitas. Gender dapat memberikan wawasan tentang pengalaman individu dalam menavigasi rumah tangga dan ruang publik. Memahami pengalaman masyarakat adat dapat mengungkap pengalaman dan perlakuan terhadap suatu kelompok, yang juga mencakup dinamika gender. Lebih lanjut lagi, kedua identitas menerima perlakuan yang berbeda di bawah perundang-undangan dan memiliki pengalaman unik dikecualikan dalam proses-proses pembuatan keputusan. Harapan kami adalah dengan menyajikan kasus perempuan dan masyarakat adat dapat memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai dimensi diferensiasi sosial bersinggungan dalam praktiknya, yang memaksa kita untuk mengamati perbedaan skala-skala tersebut dan menunjukkan keberadaan kelompok kurang terwakili lainnya.

Bertindak dengan tepat berfokus pada perempuan dan masyarakat adat karena tantangan yang mereka hadapi mewakili berbagai kesulitan untuk mencapai inklusi yang berkesetaraan dalam MSF. Perempuan dari masyarakat Shipibo-Conibo di Loreto, Peru, berpartisipasi dalam sebuah lokakarya devolusi. Foto oleh Marlon del Águila/CIFOR.

PENGHAMBAT YANG UMUM BAGI PEREMPUAN

Norma sosial

Struktur sosial yang menahan atau bahkan melarang perempuan untuk berbicara dalam kelompoknya, terutama di depan laki-laki.

Peran gender

Perempuan sering dibebani dengan tugas rumah tangga, pengasuhan anak dan pengumpulan sumber daya, sehingga hanya menyisakan sedikit waktu untuk pertemuan.

Pembatasan mobilitas

Perempuan tidak dapat bepergian karena tuntutan rumah tangga atau kurangnya sumber daya, atau tidak diizinkan oleh laki-laki. Kurangnya akses terhadap teknologi menghambat keterlibatan secara daring.

Rendahnya literasi dan tingkat pendidikan

Kurangnya informasi dan kapasitas menghalangi perempuan untuk terlibat dalam berbagai isu dan merusak kepercayaan diri mereka.

Rendahnya kepercayaan diri

Perempuan tetap diam dalam ketakutan, walaupun mereka memiliki pengetahuan dan pendapat yang penting.

Bertindak dengan tepat memperluas dan melengkapi pekerjaan sebelumnya yang mengembangkan perangkat pemantauan untuk MSF secara lebih luas (Sarmiento Barletti dan Larson 2019; Sarmiento Barletti dkk. 2020a), dengan versi spesifik yang dikembangkan untuk komite pengelolaan bersama kawasan lindung (Sarmiento Barletti dkk. 2020c) dan untuk partisipasi perempuan adat dalam tata kelola masyarakat (CIFOR dan ONAMIAP 2020)

PENGHAMBAT UMUM BAGI MASYARAKAT ADAT

Bepergian dan akses

Kurangnya dukungan keuangan untuk bepergian membuat masyarakat adat tetap berada di rumah, khususnya karena mereka cenderung lebih terisolasi secara geografis. Kurangnya akses internet telah memperparah situasi selama pandemi COVID-19.

Hak tidak diakui, tidak dikenali atau tidak ditegakkan

Pemerintah mungkin tidak mengakui hak, dan masyarakat adat mungkin tidak mengetahuinya.

Perbedaan lintas budaya

Masyarakat adat sering kali memiliki norma dan proses yang berbeda untuk pengambilan keputusan dan diskusi. Mungkin terdapat stigmatisasi ketika kelompok lain mengharapkan masyarakat adat berperilaku dengan cara tertentu. Kurangnya penerjemahan bahasa lokal dapat menjadi penghambat yang signifikan.

Resistensi terhadap pengetahuan adat

Bias ilmiah sering mengesampingkan pengetahuan, sistem pengetahuan, dan perspektif adat.

Pemerintah mengecualikan masyarakat adat

Masyarakat adat mungkin tidak disertakan sebagai delegasi resmi atau dijamin mendapatkan kursi pada saat pertemuan, dan mungkin tidak terdapat pedoman atau kebijakan untuk melibatkan mereka atau mengakui hak-hak mereka.

BAGAIMANA PANDUAN INI DIBUAT?

Kami memilih untuk memanfaatkan berbagai konteks dan pembelajaran oleh para praktisi dari seluruh dunia untuk menyusun panduan ini. Kami memulai dengan meninjau 155 artikel² ilmiah tentang berbagai inisiatif multipihak untuk pengelolaan sumber daya alam, termasuk MSF. Ini mencakup inisiatif kelompok kehutanan masyarakat, proyek-proyek pengelolaan bersama, pembayaran untuk jasa lingkungan, dan lain-lain.

Kami mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan, yaitu, yang memungkinkan kondisi, karakteristik, kegiatan, tingkah laku atau peristiwa yang mendorong keikutsertaan perempuan dan orang-orang yang kurang terwakili serta gagasan, nilai, pengetahuan dan prioritas mereka dalam MSF

dengan cara yang bermakna, termasuk berbagai proses pembuatan keputusan dan kegiatan.

Kami menggabungkan faktor-faktor keberhasilan ini ke dalam kelompok-kelompok untuk membantu mengidentifikasi tindakan-tindakan utama yang dapat memicu perubahan positif. Temuan ini menjadi dasar pembentukan kuesioner semi terstruktur yang kami gunakan untuk mewawancarai 61 praktisi lokal, nasional dan global di Amerika Latin, Afrika dan Asia untuk belajar dari pengalaman mereka tentang MSF dan memperoleh jenis perangkat apa yang akan paling bermanfaat untuk mereka (Gambar 1). Berdasarkan temuan kami, selanjutnya kami merancang perangkat dalam panduan ini.

Gambar 1. Belajar dari beragam pengalaman untuk membangun perangkat yang mendorong inklusi.

² Kami memulai dengan sebuah pusat data 984 artikel yang dikumpulkan untuk tinjauan sintesis realis oleh Sarmiento Barletti dkk. (2020b). Selanjutnya kami menggunakan jejak pencarian "perempuan" atau "gender" atau "adat" atau "terpinggirkan" atau "masyarakat lokal" untuk memilih artikel dari pusat data asalnya yang secara khusus menangani masalah inklusi sosial. Sebanyak 261 artikel diidentifikasi dan dari jumlah tersebut, 155 secara khusus membahas inisiatif multipihak

MEMBINGKAI PANDUAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERBASIS HAK

Bertindak dengan tepat menggunakan suatu pendekatan berbasis hak, yang mengacu pada prinsip bahwa semua individu dilahirkan dengan hak atas martabat, kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan standar hidup yang layak (Shankor 2014). Hak asasi manusia ini bersifat universal; mereka tidak dapat diambil, dan tidak harus dibeli, diperoleh atau diwariskan (UNFPA 2010). Hak individu yang mendasar ini juga mencakup hak untuk berserikat dan membentuk kelompok yang juga merupakan entitas pemegang hak.

Pendekatan berbasis hak diturunkan dari bagian kerangka kerja badan internasional dan nasional yang luas, berkisar dari Deklarasi Universal PBB atas Hak Asasi Manusia (UN 1948) hingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (OHCHR 2015). Beberapa kerangka kerja penting ini melindungi hak-hak masyarakat adat, seperti Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat (ILO 1989) dan Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) (UN 2007), sementara yang lain melindungi hak-hak perempuan secara lebih luas, seperti Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (UN 1979). Selain kerangka kerja internasional, sejumlah negara juga memiliki undang-undang hak asasi manusia mereka sendiri atau hak yang dilindungi secara konstitusional, yang dapat mendukung dan menginformasikan pendekatan berbasis hak untuk MSF.

Pendekatan berbasis hak mendefinisikan kembali pembangunan, mengubahnya dari suatu aksi amal menjadi sebuah kewajiban hukum (Broberg dan Sano 2018). Dengan demikian, pendekatan berbasis hak mengatur ulang peran negara dari mitra pembangunan menjadi pemangku kewajiban yang akuntabel dan transparan; dan warga negara dari penerima manfaat pasif menjadi pemegang hak yang berdaya (Hamm 2001; Molyneux dan Lazar 2003; Nelson dan Dorsey 2018).

Lebih jauh lagi, sebuah pendekatan berbasis hak menempatkan orang-orang dan kelompok yang kurang terwakili sebagai pusat upaya pembangunan, menempatkan mereka sebagai agen aktif dalam

proses yang berdampak pada kehidupan mereka. Ini menekankan penggunaan advokasi dan mobilisasi sosial serta penguatan kelompok dan organisasi lokal (Broberg dan Sano 2018). Sejumlah badan dan organisasi pembangunan di berbagai sektor telah mengadopsi dan mempromosikan pendekatan berbasis hak (lihat misalnya UNDP 1998; UN 2003; UNESCO 2006; UNDO 2013; World Bank dan OECD 2016). Pendekatan berbasis hak baru-baru ini telah ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (UN 2015).

Dalam wawancara kami, berbagai praktisi pembangunan menyampaikan bahwa kerangka kerja berbasis hak akan sangat bermanfaat dalam pekerjaan mereka terkait MSF. Kami juga memilih pendekatan berbasis hak karena prinsip-prinsip keadilan sosial, pemberdayaan, akuntabilitas dan inklusi tertanam di dalamnya. Demikian juga, pengalaman dari berbagai MSF (Hamm 2001; Broberg dan Sano 2018; Nelson dan Dorsey 2018) mengungkap bahwa pendekatan berbasis hak dapat mendorong pada hasil-hasil pembangunan yang lebih efektif, efisien dan berkesetaraan dengan:

- ✓ **meningkatkan kapasitas para aktor** untuk terlibat dengan pemerintah dan memastikan akuntabilitas mereka
- ✓ **memperkuat kohesi sosial** dengan mencapai konsensus melalui proses partisipatif dan memfokuskan pekerjaan pada sektor-sektor yang dikecualikan dari masyarakat nasional
- ✓ **mengkodifikasi konsensus sosial dan politik** tentang di mana akuntabilitas terletak pada hukum, kebijakan dan program yang selaras dengan konvensi internasional
- ✓ **menempatkan posisi hak asasi manusia** dalam kerangka kerja hukum dan lembaga
- ✓ **melembagakan proses demokrasi**
- ✓ **mengikutsertakan mekanisme ganti rugi**

Konsep kunci dalam pendekatan berbasis hak: Pemegang hak dan pemangku kewajiban

Pendekatan berbasis hak didasarkan pada hubungan dan tanggung jawab pemegang hak dan pemangku kewajiban. Semua manusia adalah pemegang hak. Pemegang hak perlu bekerja untuk mendorong, membela dan memenuhi klaim mereka atas hak dan kebebasan. Individu dan kelompok

yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan memungkinkan realisasi hak-hak adalah pemangku kewajiban. Pemangku kewajiban memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak orang lain (Sen 2004; Broberg dan Sano 2018). Kita semua adalah pemegang hak dan pemangku kewajiban, bergantung pada konteks, isu dan relasi yang berlaku. Gambar 2 menguraikan tanggung jawab pemegang hak dan pemangku kewajiban dalam MSF untuk memajukan pemberdayaan dan inklusi perempuan, masyarakat adat dan orang-orang yang secara historis kurang terwakili.

PEMEGANG HAK

PENGUATAN KAPASITAS PEMEGANG HAK	AKSI KOLEKTIF	REALISASI HAK
<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran dan informasi/pengetahuan (tentang hak, peran, tanggung jawab – sumber daya dan proses) Tekanan dari aktor nonpemerintah dan pemerintah untuk mengikutsertakan perempuan dan masyarakat adat 	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi/koalisi/jaringan Mobilisasi Kolaborasi/koordinasi – kepercayaan dan timbal balik Negosiasi/aliansi Kepemimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan untuk menindaklanjuti hak untuk menggunakan/menikmati hak tersebut Informasi Sumber daya Kondisi konteks Karakteristik pemegang hak

PEMANGKU KEWAJIBAN

LINGKUNGAN PEMUNGKIN	MENGEMBANGKAN/MEMPERKUAT KAPASITAS PEMANGKU KEWAJIBAN	TRANSFORMASI
<ul style="list-style-type: none"> Proses dan pengaturan kelembagaan Kebijakan, lembaga dan struktur hukum (jenis dan tingkat) Kehadiran aktif aktor pemerintah dan nonpemerintah pada tingkat yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran atas tanggung jawab dan kewajiban Kemampuan dan kewajiban yang diwujudkan untuk melindungi, menghormati dan mengamankan hak 	<ul style="list-style-type: none"> Aliansi dan ruang untuk dialog, ketidaksepakatan, konsensus dan perubahan Penekanan pada pembelajaran sosial/reflektif – memungkinkan inovasi Dapat dijangkau dan aman (tanpa kekerasan/konflik)

Gambar 2. Tanggung jawab pemegang hak dan pemangku kewajiban dalam forum multipihak.

Dalam konteks MSF, pemangku kewajiban dapat mencakup perancang, penyelenggara dan pelaksana MSF, juga otoritas pemerintah, LSM dan donor. Pemangku kepentingan dalam MSF adalah pemegang hak, dan memiliki perkembangan pergerakan untuk membingkai ulang mereka seperti itu (Ooft 2008; Rantala dkk. 2013). Di bawah banyak kerangka kerja hukum nasional, mungkin juga terdapat kekuatan hukum untuk memasukkan kelompok dan individu yang kurang terwakili di dalam MSF. Dengan cara ini, mengatasi ketidaksetaraan bukan hanya tambahan untuk memenuhi persyaratan, melainkan kewajiban untuk mengakui hak-hak kelompok yang kurang terwakili. Gambar 3 mengilustrasikan tujuan-tujuan terkait yang diatur berdasarkan skala waktu dan berdasarkan tingkat kontrol dan pengaruh MSF. Ini menyoroti beberapa tantangan, sejalan dengan proses yang dapat memperkuat pengakuan dan realisasi hak, juga menyoroti ruang yang memungkinkan aksi kolektif dan peningkatan kapasitas.

Panduan ini mengemukakan bahwa proses-proses transformasi yang mengarah pada hasil yang berkesetaraan membutuhkan kerja sama dengan pemegang hak dan pemangku kewajiban dalam MSF.

Apa kegunaan panduan ini bagi forum multipihak

Berbagai manfaat atau produk bisa diperoleh penyelenggara atau perancang MSF dari panduan ini:

- **refleksi tentang bagaimana cara menyelenggarakan MSF**, dengan proses terstruktur bagi para penyelenggara untuk mempertimbangkan tujuan dan aksi nyata yang meningkatkan inklusi ketika memulai proses perencanaan suatu MSF
- **perangkat untuk memantau proses**, melalui kerangka kerja untuk merekam aksi-aksi yang dilakukan secara berkala
- **panduan tentang cara merefleksikan kemajuan**, dengan pertanyaan untuk memantik diskusi serta mendorong pembelajaran organisasi dan refleksi diri
- **masukan bagi peta jalan untuk perubahan** yang memandu aksi-aksi MSF untuk mencapai tujuannya.

Tantangan perempuan dalam MSF

Banyak presiden dan pimpinan masyarakat merendahkan perempuan karena mereka berpikir perempuan tidak seharusnya berpartisipasi dalam ruang multipihak. Ini berarti tidak ada dukungan sosial yang menjamin partisipasi perempuan dalam proses-proses pembuatan keputusan.

— *LSM Lingkungan Hidup, Peru*

Saya belum menemukan banyak forum yang perempuan diberikan posisi pemimpin. Perempuan ada di sana, mereka hadir, tapi saya belum melihat banyak perempuan yang diberikan posisi sebagai pembuat keputusan atau pemimpin. Namun dalam beberapa forum di mana perempuan menjadi pemimpin, mereka tampil dengan hebat dan menjadi contoh.

— *Swapna Sarangi, Foundation for Ecological Security, India*

Apakah kita menjadikan perempuan arsitek atau artisan untuk masa depan mereka sendiri?

— *Alain Frechette, Rights and Resources Initiative*

Gambar 3. Hasil-hasil potensial dari panduan ini.

Masing-masing proses ini dapat dimulai secara independen, atau mereka dapat digunakan secara bersamaan dan secara berulang. Dimungkinkan juga untuk mengulanginya kapan saja diperlukan.

Memperkenalkan teori perubahan

Teori perubahan (TOC) adalah sebuah proses terstruktur dalam mengidentifikasi tujuan dan selanjutnya strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Belcher dan Hughes 2020; Belcher dkk. 2020). TOC sering digunakan untuk mengidentifikasi jalur sebab-akibat yang menghubungkan MSF dan hasil yang dimaksudkan (keluaran, hasil dan dampak) – dalam hal ini, apa yang perlu terjadi untuk memperkuat kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kami menggunakan temuan kami untuk mengembangkan TOC dengan menyintesis pengalaman-pengalaman MSF yang kami kaji. Dalam TOC kami mengidentifikasi lima arena aksi yang mendorong inklusi. Untuk masing-masing arena aksi, tujuan dapat diidentifikasi.

MENGATUR UNTUK INKLUSI

Para perancang dan pelaksana MSF dapat meningkatkan inklusi melalui cara-cara praktis mereka menyelenggarakan MSF, seperti membentuk struktur yang memberikan lebih banyak peluang untuk partisipasi dan kepemimpinan, menyediakan fasilitator terlatih yang peka kesetaraan, mengadakan pertemuan dalam bahasa setempat, memberikan penjelasan yang bersahabat dan sesuai secara budaya untuk istilah-istilah teknis, dan mengimplementasikan pemantauan mandiri untuk memastikan bahwa masyarakat telah diikutsertakan secara bermakna dan pembelajaran reflektif telah didorong. Mobilitas sering menjadi penghambat, dalam hal akses ke sumber daya dan norma sosial yang memungkinkan untuk bepergian. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penting bagi para peserta, seperti menyediakan akomodasi untuk pengasuhan anak yang sesuai secara budaya, membuat ruang pertemuan aman dan terjamin serta menyediakan cukup uang untuk bepergian secara aman dan dengan cara yang dapat diterima secara budaya. Ini termasuk mengatasi norma sosial yang membatasi yang sering menghalangi orang-orang untuk berpartisipasi, seperti larangan berbicara, bepergian atau bergabung dalam kelompok gender campuran.

MENINGKATKAN PENGARUH

Pengaruh berarti lebih dari sekedar memastikan kehadiran perempuan dan masyarakat adat. Pengaruh berarti keterwakilan yang lebih baik, keanggotaan yang meningkat, waktu berbicara yang dijamin, kekuasaan untuk mengatur agenda dan duduk dalam kepemimpinan atau komite eksekutif. Ini termasuk representasi di antara pembicara, panel, para ahli dan moderator. Tekanan pemerintah, LSM dan donor bisa efektif. Lebih lanjut lagi, sejumlah lembaga tersebut dapat menjadi lebih efektif dalam inklusi ketika terdapat perempuan dan masyarakat adat yang menjabat posisi tinggi pada lembaga mereka sendiri.

3 MEMPERKUAT KAPASITAS

Penguatan kapasitas dan pelatihan bagi pemegang hak maupun pemangku kewajiban dalam kepemimpinan, keterampilan teknis dan kesadaran hak juga dalam keterampilan presentasi/berbicara/komunikasi/organisasi membangun pengetahuan dan kepercayaan diri. Penguatan kapasitas berkontribusi pada pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran dan akses terhadap informasi dan pelatihan. Peningkatan kapasitas menciptakan lingkaran umpan balik bagi partisipasi dan kepercayaan diri: saat partisipan memperoleh keterampilan, mereka memperoleh kepercayaan diri, dan berpartisipasi lebih banyak, sehingga membangun kepercayaan diri yang lebih besar atas kemampuan mereka sendiri.

4 MEMPERKUAT AKSI KOLEKTIF

Jaringan sosial, organisasi, koalisi dan kepercayaan publik membangun kapasitas, pengalaman dan modal sosial yang mendorong inklusi perempuan dan masyarakat adat dalam pembuatan keputusan. Mendukung organisasi perempuan dan adat, serta berinvestasi dalam penguatan jaringan dan kelompok, mendorong pemberdayaan dan inklusi dalam pembuatan keputusan dan membantu membangun aliansi, dan jaringan yang meningkatkan kemampuan bernegosiasi.

5 FOKUS PADA DAMPAK

Memiliki jalur yang jelas menuju dampak memotivasi partisipasi dan memberikan alasan bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam MSF. Dampak yang diinginkan dari MSF dapat bervariasi, namun mereka seharusnya dikaitkan dengan hasil-hasil nyata dalam kebijakan, tata kelola, penghidupan, pengelolaan sumber daya, hak asasi manusia dan bidang-bidang pembangunan lainnya. Pemberdayaan, penguatan aksi kolektif dan peningkatan kapasitas juga dapat menjadi tujuan. Yang penting, MSF dan organisasi lokal harus memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang tepat untuk mewujudkan dampak.

Arena aksi dapat diatur menjadi teori perubahan yang mengidentifikasi tingkat pengaruh yang dimiliki MSF terhadap arena aksi. Ini dapat menunjukkan pada wilayah mana MSF memiliki kontrol yang paling besar, dan di bagian mana MSF perlu mengembangkan strategi dengan yang lain agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Lihat Gambar 4 untuk contoh bagaimana arena aksi telah diatur menjadi suatu teori perubahan.

Gambar 4. Sebuah teori perubahan berbasis hak untuk aksi kolektif dan kesetaraan gender.

Arena aksi adalah kondisi di mana perubahan dapat dipercepat dan tujuan dapat tercapai.

Arena aksi juga saling berinteraksi dan menguatkan satu sama lain. Misalnya, peningkatan kapasitas keterampilan berbicara akan berdampak positif pada upaya meningkatkan pengaruh pemangku kepentingan.

Kami juga membuat dua perangkat untuk mengoperasionalkan inklusi dalam teori perubahan.

Gambar 4 juga menunjukkan bagaimana perangkat (dijelaskan pada bagian selanjutnya) berfungsi untuk mempercepat berbagai perubahan tersebut. Pada bagian berikutnya kami menyajikan deskripsi langkah demi langkah tentang cara perangkat ini diaplikasikan ke dalam MSF.

PERANGKAT

Perangkat ini dapat digunakan kapan saja, mengingat terdapat potensi perbaikan pada setiap fase MSF. Namun demikian, perangkat ini dapat memberikan peluang terbesar untuk berdampak ketika diluncurkan pada fase perancangan awal MSF.

Melalui tinjauan literatur dan wawancara, kami mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang berkontribusi pada inklusi yang berarti untuk perempuan dan masyarakat adat dalam MSF, dan penghalang yang menghambat inklusi mereka. Jika dilihat melalui lensa berbasis lahan, faktor-faktor keberhasilan ini dapat dikelompokkan menjadi dua arena aksi: kapasitas dan struktur. Kapasitas termasuk kemampuan, kesadaran dan motivasi pemegang hak untuk menegaskan hak mereka. Ini termasuk kapasitas pemangku kewajiban untuk bekerja memenuhi hak para pemegang hak. Arena yang kedua termasuk struktur legal, sipil, politik, sosial dan ekonomi yang dapat mendorong atau menghambat inklusi.

Kami meyakini bahwa arena-arena aksi ini adalah titik pemicu yang baik pemangku kewajiban maupun pemegang hak dapat mengambil langkah spesifik untuk meningkatkan inklusi. Kami mengembangkan dua perangkat yang berfokus pada arena aksi ini. Pada bagian ini, kami menjelaskan tentang perangkat tersebut, menerangkan cara menggunakannya dan memberikan contoh bagaimana masing-masing dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi. Gambar 5 memberikan gambaran singkat tentang perangkat dan bagaimana mereka terkait satu sama lain. Pada bagian terakhir, kami menyajikan pembelajaran, contoh-contoh dan cerita keberhasilan dari para praktisi di lapangan.

Perangkat yang diberi nama **Mobilisasi struktur** untuk menelusuri pengaturan dan struktur kelembagaan yang dapat mendorong atau membatasi inklusi MSF, dan menyarankan mekanisme untuk penetapan tujuan strategis dan aksi pemantauan untuk katalisasi perubahan. Perangkat yang diberi nama **Mengungkap kapasitas** memanfaatkan faktor-faktor keberhasilan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis peluang untuk memperkuat kapasitas dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam MSF. Berbagai perangkat ini dapat diaplikasikan kapan saja, mengingat terdapat potensi untuk perbaikan pada setiap fase MSF.

Sejumlah perangkat ini menyediakan mekanisme bagi penyelenggara dan pelaksana MSF untuk meningkatkan inklusi yang lebih berarti. Masing-masing mengajak penggunaanya

Siapa yang harus menggunakan perangkat ini?

Agar perangkat ini dapat diimplementasikan secara efektif, pemangku kepentingan kunci MSF (pemegang hak dan pemangku kewajiban) harus terwakili selama proses, baik dalam fase perancangan maupun implementasi MSF. Jika MSF memiliki komite eksekutif, keterlibatan anggota komite tersebut akan sangat berharga. Mungkin bermanfaat untuk menetapkan subkomite atau membentuk subkelompok dan menugaskan mereka untuk menerapkan perangkat tersebut dan melakukan pemantauan lanjutan. Penting agar terdapat satu atau lebih orang yang dapat diandalkan untuk perangkat ini, sehingga terdapat tindak lanjut dan keberlanjutannya.

untuk merefleksikan dua pertanyaan penting: Bagaimana kemajuan kita? dan, Apakah kita bertindak dengan tepat? Perangkat ini bekerja paling baik ketika digunakan sebagai kerangka kerja untuk diskusi dan pembuatan keputusan, idealnya dalam pengaturan kelompok.

Perangkat ini dapat diadaptasikan dan diaplikasikan dalam beberapa cara. Sebagai contoh, **Mobilisasi struktur** dapat berfungsi sebagai latihan penetapan tujuan yang bermanfaat sebelum analisis peluang dan penghambat yang disediakan melalui **Mengungkap kapasitas**. Namun demikian, perangkat ini juga dapat digunakan secara independen dan/atau secara simultan;

tidak perlu menggunakan keduanya, atau untuk menggunakannya secara berurutan. Bahkan, kami merekomendasikan penggunaan alat ini secara berulang atau dalam siklus – yang metode ini ditinjau kembali, disesuaikan dan diadaptasi berulang kali – (lihat Gambar 5). Pendekatan ini memahami bahwa konteks akan terus berubah, demikian juga dengan aspirasi MSF; dan terlibat dalam pembelajaran kelompok yang direncanakan dan berulang akan menjadi mekanisme untuk adaptasi terhadap sifat dinamis dari pelibatan multipihak dalam konteks sumber daya alam. MSF jangka pendek – yang bertemu sekali atau hanya beberapa kali – mungkin tidak memiliki banyak siklus, namun pendekatan ini masih dapat bermanfaat.

Gambar 5. Cara kerja perangkat.

PERANGKAT UNTUK MOBILISASI STRUKTUR

Tujuan dari perangkat ini, *Mobilisasi struktur*, adalah untuk mendukung MSF dalam menetapkan tujuan gender dan inklusi sosial.

Tujuan-tujuan tersebut harus tertanam dalam struktur sosial juga proses politik, ekonomi dan kelembagaan yang menentukan lingkungan pemungkin/penghambat yang memungkinkan pemangku kewajiban untuk memenuhi kewajiban mereka; ini juga harus tertanam dalam proses-proses yang menentukan keterwakilan pemegang hak, dan penegakan serta redistribusi hak dan manfaat.

Mobilisasi struktur menilai kondisi lingkungan pemungkin dan konteks yang memotivasi atau menghalangi inklusi, mengidentifikasi strategi untuk perubahan dan memberikan titik awal untuk memantau kemajuan. Ini menyediakan kerangka kerja untuk penetapan tujuan kolektif dan mengidentifikasi strategi, juga panduan tentang pemantauan. Perangkat ini juga dapat berfungsi untuk membantu mempersiapkan peta jalan untuk perubahan.

Perangkat ini dibagi ke dalam tiga tahap, masing-masing dengan beberapa langkah. Halaman selanjutnya mengajak Anda untuk memahaminya secara lebih terperinci.

Perangkat Mobilisasi struktur bertujuan untuk mendukung MSF dalam menetapkan tujuan-tujuan gender dan inklusi sosial. Foto: Lokakarya pemetaan di Nakhon, Kabupaten Kassena Nankana – Ghana, oleh Axel Fassio/CIFOR.

1

Analisis struktur

LANGKAH 1

Identifikasi pemegang hak dan pemangku kewajiban dalam isu yang terkait dengan MSF anda: Siapakah pemegang hak utama? Di mana mereka kekurangan kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif? Siapakah para pemangku kewajiban? Di mana letak kekurangan kapasitas untuk memenuhi kewajiban mereka? (diadaptasi dari UNFPA 2010).

LANGKAH 2

Analisis struktur yang menantang atau berkontribusi terhadap inklusi. Lihat Gambar 2 untuk deskripsi tentang kapasitas dan struktur dan tanggung jawab pemegang hak dan pemangku kewajiban yang terkait. Untuk setiap kategori, diskusikan terkait MSF atau isu Anda.

LANGKAH 3

Tetapkan tujuan inklusi dengan pemangku kepentingan Anda. Kami mengidentifikasi lima arena tujuan di mana kapasitas para pemegang hak dan pemangku kewajiban dapat diperkuat (lihat Gambar 4).

LANGKAH 4

Tentukan strategi yang spesifik dengan pemangku kepentingan Anda. Untuk setiap bidang tujuan di atas, para partisipan MSF menetapkan tujuan, mengidentifikasi strategi dan memantau kemajuan. Lihat Tabel 1 sebagai contoh.

2

Operasionalisasi

3

Pantau

LANGKAH 5

Tinjau kemajuan secara rutin sebelum, selama dan sesudah MSF dengan pemangku kepentingan. Pemantauan harus ditugaskan kepada orang tertentu atau komite yang akan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemantauan, membahas dan membagikan hasil dan memberikan masukan ke dalam perencanaan MSF. Pemantauan harus menjawab pertanyaan dasar untuk memahami apakah kemajuan telah dicapai. Anda dapat mengacu pada perangkat *Bagaimana Kemajuan Kita?*³, sebuah perangkat pemantauan reflektif yang dikembangkan oleh CIFOR. Anda juga dapat melihat perangkat pemantauan lain yang disebutkan dalam dokumen ini (lihat halaman 39).

LANGKAH 6

Sesuaikan tujuan dan strategi sesuai kebutuhan. Jadwalkan sesi dengan komite eksekutif, pemegang hak utama dan pemangku kepentingan lain untuk membahas hasil pemantauan. Kegiatan ini harus secara jelas mengikutsertakan dan dipandu oleh pemegang hak. Diskusi dapat dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana: Apa yang dapat kita pelajari dari hasil ini? Selanjutnya, tinjau kembali tujuan dan strategi untuk melihat apa yang perlu disesuaikan.

3 Lihat perangkat pemantauan *How are we doing?* (Sarmiento Barletti dkk. 2020a) dapat diakses pada <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7796>

TIPS

PEMANTAUAN

— Pemantauan tidak harus rumit.

Pemantauan secara sederhana berarti mengumpulkan informasi secara sistematis dan mendiskusikannya secara teratur.

— **Mulai dengan menentukan pertanyaan yang ingin Anda jawab,** kemudian cari tahu informasi terbaik untuk dikumpulkan agar dapat menjawab pertanyaan tersebut.

— **Libatkan pemangku kepentingan Anda dalam proses;** mereka dapat membantu menentukan pertanyaan pemantauan dan selanjutnya mengumpulkan informasi. Anda dapat membentuk subkomite pemantauan.

— **Sebar luaskan hasil pemantauan melalui berbagai saluran informasi** untuk membuat proses menjadi transparan dan mendapatkan masukan.

— **Pemantauan harus menyediakan mekanisme untuk mendeteksi konsekuensi yang tidak dimaksudkan dari proses terkait,** seperti kekerasan berbasis gender dan potensi hasil negatif lainnya. Ini penting untuk mewaspadai kemungkinan konflik sehingga mereka dapat dengan cepat ditangani.

— **Terdapat banyak perangkat pemantauan interaktif untuk membuatnya menjadi menarik dan visual (lihat halaman 39).** Mintalah saran dari pemangku kepentingan Anda.

Tabel 1. Contoh kerangka kerja tujuan dan strategi dengan contoh-contoh strategi

TUJUAN	STRATEGI
MENGATUR INKLUSI	Jasa pengasuhan anak akan disediakan secara cuma-cuma bagi partisipan setiap hari selama MSF.
MEMBANGUN KAPASITAS	Tiga lokakarya persiapan akan disediakan bagi semua partisipan untuk mengembangkan keterampilan berbicara mereka.
MENINGKATKAN PENGARUH	Setidaknya 50% dari komite eksekutif adalah perempuan.
MEMPERKUAT AKSI KOLEKTIF	Empat organisasi perempuan lokal akan menjadi sorotan, dan perwakilan mereka akan menjadi moderator diskusi umum.
FOKUS PADA DAMPAK	MSF akan menghasilkan dua rekomendasi yang berfokus pada gender, pemerintah nasional sepakat untuk mendengarkan rekomendasi kami, dan rekomendasi akan dibagikan kepada semua kandidat yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan perwakilan.

PERANGKAT UNTUK MENGUNGKAP KAPASITAS

1

Analisis peluang dan kesenjangan kapasitas

Sebuah strategi dasar dengan pendekatan berbasis hak diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemegang hak dan pemangku kewajiban. Perangkat ini, **Mengungkap kapasitas**, menyediakan cara yang terstruktur untuk menilai suatu MSF terkait peluang dan kesenjangan kapasitas, serta membangun strategi untuk mengatasinya.

Perangkat ini harus digunakan dalam format kelompok, termasuk para pemangku kepentingan utama, penyelenggara MSF atau suatu kelompok spesifik yang ditugaskan untuk kegiatan ini.

Perangkat ini dibagi ke dalam tiga tahap. Halaman berikutnya membahas langkah-langkah ini secara rinci.

LANGKAH 1

Tinjau daftar faktor-faktor keberhasilan dan penghambat sebagai titik awal. Tabel 2 dan Tabel 3 menyajikan faktor-faktor keberhasilan yang diidentifikasi dari literatur, masing-masing bagi perempuan dan masyarakat adat, yang dikelompokkan berdasarkan arena aksi.

Ini dimaksudkan untuk menjadi titik awal diskusi. Tidak semua faktor keberhasilan dapat diterapkan, dan faktor keberhasilan lain dapat ditambahkan oleh para pemangku kepentingan. Mungkin bermanfaat untuk mengidentifikasi dan berfokus pada beberapa faktor keberhasilan yang paling penting (misalnya tiga atau empat) untuk setiap arena aksi.

Kami menemukan bahwa faktor-faktor keberhasilan bagi perempuan dan masyarakat adat memiliki beberapa tumpang tindih, secara umum mereka menyajikan area fokus yang berbeda. Meninjau kedua kelompok ini dapat membantu menginformasikan faktor-faktor keberhasilan yang kemungkinan diabaikan bagi perempuan dan masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor keberhasilan juga dapat bertentangan – misalnya, dengan norma budaya yang menghalangi partisipasi perempuan adat – yang dapat menjadi area penting untuk diskusi dan resolusi.

LANGKAH 2

Nilai MSF Anda untuk setiap faktor keberhasilan. Langkah selanjutnya adalah untuk mendiskusikan setiap faktor keberhasilan, dan secara kolektif menetapkan kriteria yang spesifik untuk menentukan apakah suatu faktor keberhasilan telah dicapai, dan berdasarkan kriteria tersebut, di manakah posisi MSF berada. Ini bukan proses yang sederhana, dan ini mungkin membutuhkan diskusi yang panjang. Namun demikian, diskusi ini merupakan peluang pembelajaran kelompok yang berharga, dan bermanfaat untuk membuat catatan untuk berbagi dengan yang lain.

Salah satu perangkat penilaian adalah pendekatan lampu lalu lintas, yang warna-warna berikut ini ditautkan pada masing-masing faktor keberhasilan:

- Tidak, sangat sedikit sampai tidak ada kemajuan, tidak terjadi
- Cukup, terdapat beberapa kemajuan, tidak sepenuhnya terjadi
- Ya, dilaksanakan, terjadi

Tabel 2.

Faktor-faktor keberhasilan untuk inklusi perempuan, disusun berdasarkan tujuan

Mengatur untuk inklusi				N/A
Perempuan memiliki mobilitas dan sumber daya untuk bepergian dan berkumpul				
Perempuan dan laki-laki dapat berinteraksi dan berdiskusi bersama				
Proses-proses organisasi, diskursus dan budaya ditinjau dan diubah untuk mendorong partisipasi perempuan, memungkinkan pengelolaan perselisihan yang efektif, menggunakan kelompok kecil atau kelompok khusus perempuan, struktur berjenjang untuk pembuatan keputusan dan bahasa yang inklusif				
Tersedianya dukungan rumah tangga tambahan bagi perempuan, termasuk menyediakan jasa pengasuhan anak dengan cara yang sesuai secara budaya				
Terdapat sistem pemantauan mandiri dan pendekatan pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan, termasuk pemantauan gender pada tingkat lokal (misalnya masyarakat), regional dan nasional (misalnya kebijakan sektoral, intervensi pemerintah dan LSM)				
Staf atau peneliti terlatih yang peka kesetaraan mengawasi, memfasilitasi dan mendukung pembelajaran melalui pertanyaan yang memancing diskusi untuk latihan kelompok dan asumsi				
Ruang pembuatan keputusan adalah lingkungan sosial yang dapat diakses dan aman, serta masalah keamanan dan keselamatan untuk bepergian menuju dan berpartisipasi dalam suatu acara ditangani secara serius				
Ruang pembuatan keputusan dibuat kondusif untuk partisipasi, dengan nuansa kolaborasi, kerja sama, kepercayaan, rasa hormat dan resiprokal, dan konflik ditangani secara strategis				
Bahasa lokal digunakan dan jika tidak memungkinkan, tersedia interpretasi dan bahan-bahan terjemahan				
Konflik dikelola melalui identifikasi kesamaan dengan mengurangi interaksi yang konfrontatif				
Perempuan miskin atau berkasta rendah secara aktif diikutsertakan dan terwakili, dan kesenjangan pendidikan, seperti literasi, dikenali dan ditindaklanjuti				

Meningkatkan pengaruh

N/A

Terdapat tekanan (kebijakan gender, panduan, peraturan, kuota) dari pemerintah, donor dan LSM untuk mengikutsertakan perempuan				
Peran dan pengetahuan perempuan tentang sumber daya alam diakui, dihargai dan diinkorporasikan				
Perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan atas isu-isu penting dan strategis				
Semua anggota dapat berkontribusi pada poin-poin agenda; perempuan terlibat dalam penyusunan agenda dan isu gender dimasukkan serta ditindaklanjuti dalam agenda pertemuan				
Semua anggota terlibat dalam pembuatan keputusan dengan kekuatan pengambilan keputusan yang nyata				
Perempuan dan orang miskin secara aktif diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi sebelum keputusan dibuat				
Terdapat peluang untuk terhubung secara informal dengan sesama pemangku kepentingan, dengan berjalan kaki ke pertemuan, berbicara dengan teman dan memperoleh informasi				
Perempuan terwakili dalam komite eksekutif secara berkesetaraan, dan kehadiran mereka diwajibkan untuk persetujuan perubahan dan rencana prosedural yang penting				
Perempuan terwakili secara berkesetaraan di antara pembicara, panel, para ahli dan moderator				
Terdapat struktur tata kelola yang berjenjang yang meningkatkan jumlah total posisi kepemimpinan dan membuka lebih banyak peluang serta ruang bagi perempuan pada semua tingkat (termasuk komite eksekutif, subkomite dan kelompok-kelompok spesifik), memastikan perempuan memperoleh kepercayaan diri, keterampilan kepemimpinan dan fasilitasi untuk mengambil posisi kepemimpinan.				

Memperkuat kapasitas

N/A

Sejumlah orang diberdayakan melalui kesadaran dan pengetahuan tentang hak mereka selama pelatihan dan lokakarya, serta terdapat penekanan pada kesetaraan dan hak				
Terdapat kegiatan penguatan kapasitas yang memperkuat keterampilan teknis, pengetahuan dan kepercayaan diri				
Terdapat peningkatan kapasitas yang memperkuat kepemimpinan dan tata kelola				
Menyadari bahwa tingkat pendidikan perempuan yang lebih tinggi meningkatkan kepercayaan diri mereka; program pendidikan dan literasi didukung dan sedapat mungkin menjadi bagian dari proses				

Memperkuat aksi kolektif

N/A

Terdapat strategi yang eksplisit oleh pemangku kepentingan untuk membawa partisipan ke tujuan dan misi bersama dan membawa pemahaman bersama sebagai kelompok

Memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat dan secara eksternal; jaringan sosial dapat membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik, memperkuat modal sosial, membangun keterampilan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya

Organisasi, jaringan, suara-suara kolektif dan pergerakan sosial perempuan diperkuat dan diberikan dukungan yang diperlukan perempuan untuk secara efektif terlibat, membangun pengalaman dalam aksi kolektif, membangun kepercayaan diri, menyediakan akses terhadap informasi, membangun aliansi serta memastikan koordinasi dan negosiasi

Fokus pada dampak

N/A

Institusi lokal bersifat demokratis, partisipatif dan inklusif, dan pembuatan keputusan dilakukan secara *bottom-up*

Pemimpin perempuan yang kuat, visioner dan pragmatik hadir dan diperkuat

Terdapat penekanan yang disengaja pada pembelajaran sosial, termasuk refleksi atas proses-proses dan budaya pembuatan keputusan, untuk mengubah norma, perilaku dan harapan

Lingkungan yang mendukung bagi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat terwujud

Peran perempuan dalam pertanian dan pengetahuan mereka tentang sumber daya alam diakui dan ditindaklanjuti

Organisasi lokal memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang tepat

Partisipasi menghasilkan manfaat dan hasil yang jelas

Tabel 3.

Faktor keberhasilan untuk inklusi masyarakat adat, disusun berdasarkan tujuan

Mengatur inklusi				N/A
Terdapat pemahaman yang jelas tentang harapan dan kondisi sejak dari awal, terkait kewenangan pengambilan keputusan, masalah fiskal dan jadwal				
Terdapat penerimaan nilai dan legitimasi terkait pengetahuan adat. Terdapat navigasi, koordinasi dan pemahaman yang berhasil terkait berbagai sistem pengetahuan: praktik-praktik tradisional, peraturan pemerintah, serta harapan ilmiah dan pengelolaan internasional				
Lokakarya dan pertemuan diselenggarakan dalam bahasa lokal atau tersedia terjemahan				
Prosedur pembuatan keputusan tidak meminggirkan kelompok-kelompok minoritas (misalnya pemungutan suara dengan aturan mayoritas)				
Organisasi pembuatan keputusan multitingkat dan struktur tata kelola berjenjang digunakan untuk memperluas partisipasi, termasuk penggunaan kelompok kerja, subkomite dan meja perencanaan				
Pengakuan hak masyarakat adat merupakan komponen mendasar dari proses pembuatan keputusan, termasuk, antara lain, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, hak atas lahan, hak untuk persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, hak untuk tidak digusur dari lahan				
Pertemuan, proses dan badan dapat dijangkau oleh masyarakat adat untuk turut berpartisipasi, dan masyarakat adat memiliki sumber daya dan mobilitas untuk bepergian, dan diikutsertakan dalam delegasi resmi				
Masyarakat adat secara berkesetaraan terwakili di antara para pembicara, panel, ahli, moderator dan komite eksekutif				
Terdapat pertemuan persiapan dan antar sesi oleh organisasi masyarakat adat				
Dewan masyarakat adat dibentuk dan secara khusus memiliki suara dalam isu-isu sumber daya alam				
Terdapat diskusi terbuka tentang faktor-faktor historis, relasi kekuasaan kolonial dan kegagalan di masa lalu, termasuk ketidakpercayaan dan resistensi terhadap pembangunan partisipatif dan konservasi yang disebabkan oleh kurangnya penghidupan dan manfaat lain, dan kegagalan sejumlah agen/pemerintah untuk menghormati komitmen mereka				
Terdapat cukup waktu bagi masyarakat adat untuk menegosiasikan kondisi untuk partisipasi				
Terdapat proses untuk menyelesaikan kepentingan yang saling bertentangan dan tradisi tata kelola yang menyebabkan frustrasi dengan aturan partisipasi dan deliberasinya				
Terdapat cukup waktu, sumber daya dan keahlian untuk bekerja dengan baik dalam lingkungan lintas budaya dan di wilayah pedalaman				

Meningkatkan pengaruh

N/A

Terdapat tekanan dari pemerintah, LSM dan donor untuk mengikutsertakan masyarakat adat, dan terdapat aliansi dengan LSM internasional untuk melindungi hak				
Hak-hak masyarakat adat diakui dalam kebijakan dan dijamin; kebijakan dan hukum juga mengatur inklusi minoritas dalam otonomi kepemimpinan dan budaya, dan terdapat jaringan pengaman serta mekanisme untuk mengatasi konflik antara hukum dan hak, adat istiadat serta praktik-praktik adat				
Terdapat penghormatan dan inklusi terhadap pendekatan dan nilai-nilai adat dalam kerangka kerja pengelolaan bersama, misalnya pendekatan pengelolaan konflik, memberikan kekuasaan pembuatan keputusan ke dalam lembaga adat, mentransfer kontrol kepada masyarakat lokal, dan mengintegrasikan kontrol sosial				
Pemerintah memiliki kebijakan dan panduan untuk melibatkan masyarakat adat dalam keputusan lokal dan untuk mengoperasionalkan hak, dan terdapat jaringan pengaman				
Pemerintah bersedia memperkuat pendekatan partisipatif dalam pengelolaan hutan				
Pemangku kepentingan dianggap sebagai 'pemegang hak' dengan hak hukum atau adat terhadap sumber daya alam, dan perundang-undangan sumber daya alam mempertimbangkan inklusi sosial				
Terdapat dana pemerintah yang didedikasikan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adat				
Terdapat pengetahuan dan kemauan untuk menggunakan kekuatan eksternal, seperti pengadilan atau tekanan internasional				
Terdapat penghormatan untuk dan inklusi nilai-nilai dan pengambilan keputusan masyarakat adat, dan memberikan kekuatan pengambilan keputusan kepada masyarakat adat				
Terdapat representasi yang adil dan merupakan refleksi dari keragaman masyarakat adat pada dewan-dewan serta badan pemerintah lokal, dengan kursi yang dijamin untuk masyarakat adat				

Memperkuat kapasitas

N/A

Masyarakat adat diberdayakan dengan hak dan pemahaman tentang cara menggunakan kerangka kerja berbasis hak				
Terdapat kepemimpinan adat yang kuat, visioner dan pragmatis serta tata kelola adat yang mendorong proses berkesetaraan dan adil				
Terdapat peningkatan kapasitas dalam pengelolaan manfaat dan insentif, juga mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan mengatasi korupsi				
LSM memperkuat tata kelola lokal dan menyediakan bantuan yang tidak dapat diberikan oleh lembaga pemerintah				
Terdapat peningkatan kapasitas dalam profesionalisme, dan pelatihan negosiasi, termasuk kemampuan masyarakat adat untuk bernegosiasi dengan lembaga negara				
Masyarakat adat terlibat dengan tujuan yang jelas				
Pembelajaran dua arah didorong sehingga masyarakat adat dan ilmuwan mempelajari sistem pengetahuan satu sama lain.				

Memperkuat aksi kolektif

N/A

Terdapat mekanisme untuk mengatasi persaingan dan klaim atas sumber daya di antara kelompok-kelompok adat				
Terdapat jaringan masyarakat, lembaga adat atau informal, dan keterlibatan yang lebih luas dengan berbagai lembaga untuk pembelajaran, diskusi dan untuk membangun kepercayaan				
Ideologi adat digunakan untuk memperkuat masyarakat dan tradisi				
Terdapat institusi lokal dan organisasi masyarakat sipil yang vokal dan kuat, dengan kerangka kerja bersama untuk berbagi informasi yang memperkuat perolehan dan pengelolaan informasi untuk memungkinkan pembangunan modal sosial, kepercayaan dan transparansi				
Terdapat pemahaman tentang prioritas, metode dan tujuan bersama dan yang saling berkompetisi di antara para pemangku kepentingan dan pengakuan terhadap masalah bersama				

Fokus terhadap dampak

N/A

Terjaminnya manfaat untuk masyarakat, atau insentif lain untuk partisipasi (misalnya manfaat ekonomi, peningkatan kapasitas) termasuk pembagian manfaat dan/atau pembagian biaya. Ini juga berlaku ketika akses terhadap lahan terbatas karena upaya-upaya konservasi

Tercapainya hak tenurial yang jelas /pasti

Penekanan bergeser dari sebuah meja perencanaan multipihak menjadi lebih terkait secara mengikat ke dalam forum pemerintah ke pemerintah

Manfaat dan kompensasi dibagikan seluas-luasnya dan sedapat mungkin secara berkesetaraan

2

Buat rencana aksi

LANGKAH 3

Untuk masing-masing peluang kapasitas atau kesenjangan “merah” atau “kuning”, diskusikan aksi.

Apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat atau mengatasinya?

Kapan dan di mana ini dapat diatasi?

Siapa pemangku kewajiban dan pemegang hak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya?

Peluang kapasitas
atau kesenjangan

Apa yang dapat
dilakukan

Kapan?

Siapa yang
bertanggung jawab?

3

Pantau

LANGKAH 4

Tinjau kemajuan secara berkala selama MSF dengan para pemangku kepentingan, sebagai contoh, satu bulan sebelum suatu acara dan selanjutnya satu minggu setelah acara tersebut.

Pertanyaan diskusi dapat mencakup: Bagaimana kita telah meningkatkan inklusi (atau tidak)? Apa tiga pembelajaran paling penting? Apa tiga tantangan utama yang harus ditingkatkan? Bagaimana kita akan mengatasinya? Anda juga dapat mengacu pada perangkat Bagaimana kemajuan kita?³, sebuah alat pemantauan reflektif partisipatif yang dikembangkan oleh CIFOR dan lihat juga alat pemantauan lain yang disebutkan pada kotak hijau di sisi kanan.

LANGKAH 5

Sesuaikan *checklist* dengan kebutuhan. Atur sesi dengan pengurus eksekutif dan para stakeholder lainnya untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan. Diskusi dapat dimulai dengan pertanyaan sederhana: Apa yang dapat kita pelajari dari hasil ini? Bagaimana kita melakukannya? Lalu, periksa kembali tujuan dan strategi untuk melihat kebutuhan apa yang perlu disesuaikan. Keputusan ini harus divalidasi oleh pemegang hak.

ALAT PEMANTAUAN

— Gender Avenger Tally

Aplikasi ini menyediakan cara interaktif untuk memantau secara langsung berapa lama waktu berbicara yang diperoleh perempuan dan laki-laki dan kelompok lainnya dalam suatu pertemuan.

<https://www.genderavenger.com/tally>

— Kartu skor

Sebuah cara untuk secara visual memeriksa apakah tujuan Anda tercapai dengan membuat suatu jenis kartu rapor atau kartu skor.

<https://www.seaf.com/womens-economic-empowerment-and-gender-equality/gender-equality-scorecard/>

— Survei dan jajak pendapat interaktif

Terdapat berbagai survei dan jajak pendapat interaktif untuk mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan sebelum, selama, dan sesudah MSF. Coba <http://Mentimeter.com> atau suatu jajak pendapat *Whatsapp*.

— Lampu lalu lintas

Lakukan secara sederhana dan visual dengan bertanya pada orang-orang untuk menilai kemajuan dengan menggunakan pendekatan lampu lalu lintas: hijau (ya, terlaksana, terjadi), kuning (cukup, terdapat beberapa kemajuan, tidak sepenuhnya terjadi), merah (tidak, tidak ada kemajuan, tidak terjadi)

3 Lihat alat pemantauan *How are we doing?* (Sarmiento Barletti dkk. 2020a) dapat diakses pada <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7796>

Mengungkap kapasitas

Perempuan dan gender

Kendala

Norma sosial membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan publik; norma tingkah laku mengharuskan perempuan untuk mengekspresikan rasa malu atau kepatuhan

Kurangnya pertimbangan untuk pandangan perempuan dalam pertemuan; ketika berbicara, opini perempuan tidak dianggap penting, atau perempuan dikeluarkan dari pertemuan atau terpaksa menunggu untuk berbicara

Kurangnya perhatian terhadap gender di tingkat lokal memperkuat pengabaian nasional terhadap isu-isu tersebut

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga kehutanan, dan rendahnya pengaruh perempuan yang hadir

Perempuan dibatasi oleh status sosial ekonomi dan atribut pribadi (akses yang tidak setara terhadap sumber daya yang produktif, informasi, pendidikan, kualitas kepemimpinan, keterampilan)

Persepsi tentang dugaan ketidakmampuan perempuan untuk berpartisipasi diperkuat oleh kurangnya kepercayaan diri mereka

Perempuan tidak menempati posisi yang lebih tinggi pada lembaga-lembaga donor internasional

Kurangnya kepemilikan pribadi dan koneksi politis mengurangi nilai penting opini perempuan

Tanggung jawab rumah tangga (mengasuh anak) membatasi partisipasi

Tidak dimasukkannya pengetahuan spesifik perempuan ke dalam diskusi

Faktor-faktor keberhasilan

Perempuan memiliki mobilitas untuk bepergian dan berkumpul di luar rumah

Pengembangan perempuan lokal melalui struktur berjenjang memberikan mereka kepercayaan diri, kepemimpinan dan keterampilan fasilitasi untuk mengambil posisi kepemimpinan di tingkat yang lebih tinggi

Pendidikan perempuan yang lebih tinggi melemahkan norma sosial regresif gender dan memberikan mereka kepercayaan diri

Kehadiran perempuan bersifat wajib di komite eksekutif untuk menyetujui perubahan dan rencana prosedural yang penting

Organisasi lokal memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang tepat

Lembaga donor berfokus pada gender dan inklusi sosial, berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang ramah gender. Termasuk dalam strateginya adalah mempekerjakan ahli gender dan mendorong pelamar perempuan untuk posisi ini

Pertemuan yang suportif menghasilkan interaksi yang lebih menyenangkan dan tidak terlalu konfrontatif. Fasilitator menekankan pentingnya kolaborasi dan proses, dan mendorong semua kontribusi, termasuk suara-suara yang tidak selaras

Kepala rumah tangga laki-laki yang lebih berpendidikan lebih menerima perempuan dalam pembuatan keputusan terkait hutan

Orang-orang diberdayakan dengan hak

Kehadiran jejaring sosial berkorelasi kuat dengan peningkatan partisipasi

Gambar 6. Contoh kapasitas yang diidentifikasi dengan memanfaatkan perangkat Mengungkap kapasitas

MEMBUATNYA BEKERJA

Dalam bagian ini, kami berbagi sejumlah pilihan contoh-contoh praktis, cerita keberhasilan dan pembelajaran, sehingga pengalaman dan wawasan mereka dapat membantu menginformasikan praktisi lainnya. Selama bekerja, kami mewawancarai 61 praktisi – di Afrika, Asia, Amerika Latin dan pada tingkat lokal – yang terlibat dalam MSF dan telah menyaksikan apa yang bekerja (dan gagal) untuk meningkatkan inklusi.

BAGAIMANA MENYELENGGARAKAN MSF YANG INKLUSIF

Para praktisi mendiskusikan berbagai pendekatan dalam penyelenggaraan MSF untuk meningkatkan inklusi dan pengaruh perempuan dan masyarakat adat.

Struktur berjenjang

Menata MSF dengan beberapa tingkatan dan pembuatan keputusan yang berjenjang – yaitu dengan subkelompok, seperti kelompok kerja atau subkomite, memberikan masukan kepada kelompok yang lebih besar – memiliki banyak manfaat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan lebih banyak peluang untuk partisipasi, tapi juga menciptakan lebih banyak posisi kepemimpinan, sehingga membangun kapasitas kepemimpinan. Kelompok yang lebih kecil bisa menjadi ruang yang lebih nyaman untuk partisipasi. Dan subkelompok dapat memilih untuk bertemu pada tingkat desa, membuat partisipasi menjadi lebih terjangkau bagi mereka yang terkendala oleh terbatasnya mobilitas.

Fasilitasi

Sejumlah praktisi mengatakan bahwa memilih fasilitator yang terlatih, peka gender dan peka budaya adalah faktor keberhasilan yang penting untuk inklusi. **Seorang fasilitator yang baik memahami budaya dan dapat mengatasi kurangnya partisipasi:**

“MSF [pada] tingkat subnasional...fasilitator mengundang perempuan selama waktu istirahat untuk berbicara menggunakan bahasa lokal, dan mereka berhasil memperoleh masukan dan suara dari para perempuan ini.”

— Pemimpin pada institusi pembangunan global, Indonesia

Faktor kunci yang bekerja berdasarkan pengalaman kami adalah pendekatan fasilitasi, menjadwalkan pertemuan pada waktu dan tempat yang sesuai, menggunakan perempuan untuk memobilisasi sesama perempuan, mendorong partisipasi secara verbal dalam pertemuan, konferensi khusus perempuan sesekali, dan menggunakan strategi yang melibatkan perempuan dan laki-laki. Dalam hal persiapan, kami menganggap sangat penting bahwa kelompok-kelompok tertentu seperti kaum muda dan perempuan memiliki pengetahuan yang memadai tentang lanskap politik, juga hak-hak mereka yang lain.

— Suzane Irau, Land and Equity Movement Uganda (LEMU), Uganda

Banyak orang tidak suka berbicara dalam kelompok besar. Cara Anda menyelenggarakan pertemuan telah diatur oleh orang-orang yang telah berkuasa paling lama. Sekedar mengundang orang ke dalam suatu ruang tidak memungkinkan orang untuk berpartisipasi secara efektif.

— Natalie Elwell, World Resources Institute

Komitmen multiarah untuk inklusi

Menjadi bagian dari jaringan dapat membantu menetapkan tujuan inklusi dan menyusun peta jalan untuk mewujudkannya. Sebagai contoh, Koalisi Pertanahan Internasional (ILC) adalah jaringan multipihak dari organisasi lokal yang berorientasi pada memastikan hak-hak lahan para pemilik lahan kecil, dengan fokus pada perempuan dan masyarakat adat serta kelompok-kelompok kurang terwakili lainnya. Berbagai organisasi anggota dirancang dan berkomitmen pada standar-standar tertentu untuk inklusi. Selanjutnya adalah tanggung jawab Sekretariat untuk menerapkan standar-standar ini di antara para anggota. Jenis pembuatan keputusan *bottom-up* dengan penegakan *top-down* telah memperkuat dan memperbaiki inklusi.

“Dengan fakta bahwa sejumlah standar telah diputuskan melalui sidang anggota, maka lebih mudah bagi kami untuk mendorong anggota agar secara efektif menerapkannya. Jika ini sekedar keputusan *top-down*, maka akan lebih sulit. Namun ini adalah hasil dari diskusi dan kesepakatan antara anggota.

— Anggota Sekretariat ILC

Kelompok terpisah

Pertimbangan untuk membentuk kelompok khusus perempuan atau masyarakat adat bergantung pada konteks. Dalam budaya dengan norma yang melarang perempuan untuk berbicara, kelompok terpisah dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berbagi dengan bebas. Ini berlaku untuk mendukung kelompok dan jaringan perempuan. Namun, harus diperhatikan agar cara ini tidak menjadi mekanisme untuk mengesampingkan kelompok kurang terwakili.

Ukuran dan format rapat

Format, ukuran dan aturan pembuatan keputusan dari MSF dapat memanfaatkan pengaruh orang-orang yang tampil dengan baik pada platform tersebut. Masyarakat adat sering memiliki norma yang berbeda tentang keterlibatan dalam pertemuan. Perempuan mungkin memiliki lebih sedikit pengalaman – dan karenanya kurang percaya diri – dalam lingkungan tertentu. Mengatasi bias format dan mendiskusikan alternatif atau solusinya secara eksplisit dapat menunjukkan pengaturan yang lebih berkesetaraan.

Agenda

Partisipasi dalam menentukan agenda MSF adalah titik pengaruh yang penting.

“...kehadiran kelompok perempuan dalam forum memang penting, namun tidak menjamin kualitas partisipasi mereka. Ruang yang tersedia harus memastikan dialog horizontal dan suatu metodologi yang inklusif sehingga kelompok-kelompok ini menjadi bagian dari proses penyusunan agenda dengan pemimpin mereka.”

— Pemimpin program keadilan gender, LSM Internasional, Kuba

Kuota

Menciptakan persyaratan bagi perempuan atau masyarakat adat dalam keanggotaan – misalnya minimum persyaratan seperti 30% – telah membuahkan hasil dalam banyak konteks. Dalam situasi yang keterwakilannya buruk, kuota dapat menciptakan irisan yang diperlukan untuk memulai proses perubahan dan menetapkan model peran untuk peserta yang lebih muda. Namun demikian, terdapat argumen berlawanan tentang pemenuhan kuota yang memberikan ilusi bahwa problem gender telah diatasi, dan ini terkadang melemahkan upaya menuju kesetaraan.

Pengasuhan anak

Membuat ketentuan terkait jasa pengasuhan anak – dengan cara yang dapat diterima secara budaya – adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Jasa pengasuhan anak tidak hanya memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi, namun juga memberi pesan bahwa partisipasi mereka memang penting:

“Keterbatasan kondisi tidak memungkinkan kami untuk membayar jasa penitipan anak untuk mengasuh anak kami .. saya bahkan membawa anak saya ke sejumlah pertemuan karena saya tidak punya tempat untuk meninggalkan mereka.”

— Pimpinan federasi Masyarakat Adat, Ekuador

Bagaimana dengan kuota?

Apa yang bekerja? Memberikan kursi bagi perempuan secara eksplisit. Mempersyaratkan agar perempuan hadir dalam intervensi. Bukti-bukti yang kami peroleh dari eksperimen sertifikasi lahan di Uganda menunjukkan bahwa ini benar-benar membuat perbedaan.

— *Economist, lembaga pembangunan global*

Di India, terdapat mandat perwakilan dewan desa melalui kuota. Ini memiliki dampak besar dalam jangka panjang; ketika para peneliti kembali ke desa-desa tersebut dan mewawancarai gadis-gadis remaja, pencapaian pendidikan dan aspirasi mereka telah meningkat.

— *Beaman dkk. 2012*

Hanya karena kita mengundang perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama, masalah gender tidak akan langsung terselesaikan. Terdapat juga isu-isu terkait memastikan keseimbangan dan keadilan.

— *Focal point untuk jaringan masyarakat adat, hak atas lahan global*

MENDUKUNG DAN MELATIH PEMIMPIN PEREMPUAN DAN KELOMPOK PEREMPUAN

Berbagai praktisi menekankan pentingnya berinvestasi jangka panjang dalam pengembangan pemimpin perempuan: bahkan dengan hanya satu atau dua pemimpin perempuan yang dinamis, lingkungannya dapat berubah. Bekerja dengan laki-laki mendorong mereka untuk menjadi sekutu yang sama pentingnya.

PELATIHAN, PERSIAPAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pelatihan, persiapan dan peningkatan kapasitas penting untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, memperkuat pemberdayaan dan memberikan kepercayaan diri bagi perempuan, masyarakat adat dan kelompok kurang terwakili lainnya, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam MSF. Di Burkina Faso, memadukan kelas literasi ke dalam proyek pengelolaan sumber daya alam dengan perempuan pedesaan membantu menjembatani kesenjangan ini. Pelatihan bagi penyelenggara MSF tentang gender, fasilitasi dan inklusi juga sama pentingnya.

Salah satu tantangan utama bagi gender dan inklusi sosial adalah kurangnya keterampilan dan keahlian yang ada dalam MSF dan program-program lain terkait pembangunan. Ini adalah alasan mengapa gender dan inklusi sosial hanya disinggung saja, namun tidak bekerja secara progresif, dan karenanya, belum terjadi perubahan yang positif. Keterampilan dan keahlian yang tepat terkait gender dan inklusi sosial membantu untuk mengangkat isu-isu secara efektif dalam MSF dan program pembangunan lainnya.

— *Tran Nhat Lam Duyen, School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University (VNU), Hanoi, Vietnam*

KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI

Perempuan dan masyarakat adat menghadapi kesenjangan dalam hal sumber daya, kapasitas dan akses teknologi. Para praktisi telah sukses menggunakan platform pesan sosial seperti grup *WhatsApp* dan siaran radio untuk menjangkau perempuan pedesaan dan masyarakat adat.

Saat ini sejumlah informasi penting beredar melalui jaringan internet, namun tidak setiap orang dapat menjangkaunya. Tantangan penting lainnya adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas tanpa [bahasa] yang terlalu teknis atau akademis sehingga semua perempuan dapat memahaminya.

- *Pemimpin jaringan perempuan pedesaan dan adat, El Salvador, Guatemala, Nikaragua*

MENGHASILKAN DAMPAK

Para praktisi semakin tidak sabar dengan MSF yang sekedar melakukan konsultasi. Mereka meyakini bahwa MSF harus bekerja lebih keras untuk menciptakan jalur untuk menghasilkan perubahan positif yang nyata bagi perempuan dan masyarakat adat.

Tingkat pengaruh tetap marginal...Kita perlu jaringan yang lebih kuat, keterkaitan yang lebih besar, agar perempuan dapat terpilih pada politik, agar perempuan memperoleh haknya, agar perempuan memperoleh pengakuan dunia.

- *Alain Frechette, Rights and Resources Initiative*

Penting untuk menyusun strategi sehingga agenda-agenda yang mendorong hak perempuan dapat menjadi bagian dari diskusi politik dan kelembagaan.

- *Pemimpin program keadilan gender, LSM internasional, Kuba*

Pelatihan, persiapan dan peningkatan kapasitas penting untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, memperkuat pemberdayaan dan memberikan kepercayaan diri bagi perempuan, masyarakat adat dan kelompok kurang terwakili lainnya, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam MSF.

Foto: Lokakarya REDD+ di masyarakat Mencoriari, Peru, oleh Marlon del Águila/CIFOR.

Cerita-cerita keberhasilan:

Mendukung pemimpin perempuan

Saya terpilih sebagai wakil presiden dalam masyarakat saya ketika saya berumur 23 tahun, dan saya sangat takut untuk berbicara. Terdapat begitu banyak stereotip di dalam benak banyak perempuan, dan mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat mencapai posisi penting karena mereka tidak mampu atau karena mereka memiliki anak-anak. Penting untuk perempuan menghilangkan ketakutan mereka, jadi itulah mengapa kami mendukung dan melatih mereka. Jika mereka tidak mengatasi hambatan ini, akan sulit untuk mencapai tujuan mereka.

— *Pemimpin federasi Masyarakat Adat, Ekuador*

Di wilayah pedesaan Meksiko, terdapat sebuah [dewan desa]. Satu orang memimpin lembaga ini dan dalam beberapa tahun terakhir ini, perempuan telah menduduki posisi ini dan menginspirasi banyak orang. Penting bahwa suami para perempuan tersebut menunjukkan solidaritas dan mendukung mereka sehingga mereka dapat melanjutkan menjabat posisi penting tersebut.

— *Pemimpin jaringan pemegang hutan pedesaan, Meksiko*

Mempersiapkan bersama pemangku kepentingan untuk MSF

Forest Forums menyatukan berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan kayu, perwakilan para pemimpin, politisi dan kepala daerah. Sebelum mengajak masyarakat bergabung ke dalam forum ini, kami mengidentifikasi berbagai organisasi berbasis masyarakat di tingkat tapak dan membangun kapasitas mereka, untuk menciptakan kesadaran tentang hak masyarakat dan juga hak dan tanggung jawab kelompok kepentingan lain dalam sumber daya alam. Ini penting, karena Anda akan membawa mereka untuk berhadapan dengan orang-orang yang lebih elite. Mereka perlu memahami isu-isu yang akan mereka sampaikan dalam forum, seperti yang terkait penegakan dan pelaporan hukum, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri.

— *Albert Katako, Civic Response, Ghana*

Menghasilkan dampak

Di Laos, kami dapat mendukung untuk pertama kalinya forum Perempuan dalam Pertanian pada tingkat nasional. Ini menghasilkan suatu kode etik dan pengakuan atas peran perempuan dalam pertanian di dalam pemerintahan. Dan pada sisi produser, ini mendorong pada kelompok produser yang dipimpin perempuan, termasuk pasar petani bersertifikat organik yang dikelola oleh petani perempuan dengan dukungan dari sektor publik dan swasta (dan suami mereka).

— *Agnieszka Kroskowska, Helvetas*

4

PERANGKAT DAN SUMBER INFORMASI TAMBAHAN

Informasi terkait Pelatihan Gender, CGIAR

<https://gender.cgiar.org/cgiar-training-materials/>

Indeks Pemberdayaan Perempuan dalam Pertanian, IFPRI

<https://www.ifpri.org/project/weai>

Informasi terkait gender, FAO

<http://www.fao.org/gender/resources/publications/en>

Kotak Gender, CIFOR

<https://www.cifor.org/knowledge/publication/4026/>

Kriteria Evaluasi Gender – International Land Coalition

<https://learn.landcoalition.org/en/e-learning-courses/e-learning-gender-evaluation-criteria-gec/>

Sistem Aksi dan Pembelajaran Gender (GALS - Gender Action and Learning Systems)

<https://dev.ckm.ilri.org/cgiar-gender/gals-for-qualitative-research/>

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI - Gender Equality and Social Inclusion)

https://uganda.oxfam.org/policy_paper/gender-action-learning-system-methodology

<https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39435857>

Brouwer JH, Woodhill AJ, Hemmati M, Verhoosel KS and van Vugt SM. 2018. The MSP guide: How to design and facilitate multi-stakeholder partnerships. Wageningen: Wageningen Centre for Development Innovation.

Estrella M and Gaventa J. 2001. Who counts really? Participatory monitoring and evaluation: A literature review. IDS Working Paper 70. Brighton, UK: Institute of Development Studies.

Guijt I. 2014. Participatory approaches, methodological briefs: Impact evaluation 5. Florence, Italy: UNICEF Office of Research. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/brief_5_participatoryapproaches_eng.pdf

Evans K, Larson AM, Mwangi E, Cronkleton P, Maravanyika T, Hernandez X, Müller P, Pikile A, Marchena R, Mukasa C, Tibazalika A and Banana A. 2014. Collaborative management and improving women's participation. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Kusters K, De Graaf M and Buck L. 2016. Guidelines: Participatory planning, monitoring and evaluation of multi-stakeholder platforms in integrated landscape initiatives. Working paper. Wageningen, The Netherlands: Tropenbos International and EcoAgriculture Partners.

Larson AM and Sarmiento Barletti JP. 2020. Designing for engagement: Insights for more equitable and resilient multi-stakeholder forums. CIFOR Infobrief 280. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Ratner B and Smith W. 2016. Collaborating for resilience: A practitioner's guide. Washington DC: CoRe. [Versi Bahasa Perancis dan Spanyol juga tersedia di <https://www.coresilience.org/resources#manuals>]

Sarmiento Barletti JP and Larson AM. 2020. Models of participation in multi-stakeholder forums: Lessons from a realist synthesis review. CIFOR Infobrief 281. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Sarmiento Barletti et al. 2020a. How are we doing? A tool to reflect on the process, progress and priorities of your multi-stakeholder forum. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).

5

REFLEKSI

Tujuan kami dengan panduan ini adalah untuk menyajikan ide, bukan solusi; tantangan untuk inklusi sangat kompleks dan unik untuk setiap MSF.

Meningkatkan inklusi tidak terjadi dalam semalam: dibutuhkan waktu, kepercayaan, ketekunan, dan komitmen untuk melakukannya dengan benar.

Salah satu faktor keberhasilan adalah upaya terus-menerus dari para perempuan adat, karena berkat itu, tuntutan kami menjadi terlihat. Sangat sulit untuk membuat pemerintah membuka pintu dialog untuk Anda, jadi kami memutuskan untuk mengorganisasi dan berjuang. Perjuangan kami telah mewakili perempuan adat selama lebih dari 25 tahun di depan berbagai departemen pemerintah seperti Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perempuan dan Kementerian Pertanian.

— *Melania Canales, Organisasi Nasional Perempuan Adat, Andes dan Amazon Peru (ONAMIAP), Peru*

Dalam kasus kami, perempuanlah yang berkontribusi dalam menyatukan masyarakat. Mereka menggunakan budaya, mereka biasa menyanyikan lagu-lagu daerah yang menyatukan masyarakat selama 20 tahun kami menunggu [kasus pengadilan tentang hak] untuk diputuskan. Seorang perempuan menjadi saksi dalam kasus tersebut dan mampu untuk mengartikulasikan dirinya di Addis Ababa selama kasus pengadilan. Orang-orang [kagum] melihat bagaimana dia bisa mengartikulasikan dirinya sendiri.

— *Daniel Kobei, Program Pembangunan Masyarakat Ogiek (OPDP), Kenya*

APA YANG TELAH KITA PELAJARI TENTANG INKLUSI

Kami menemukan bahwa faktor-faktor keberhasilan untuk mempromosikan inklusi bagi perempuan dan masyarakat adat tidak sama. Kami mendapatkan bahwa diskusi berbasis hak lebih sering diterapkan pada masyarakat adat, dan refleksi pada kendala yang terinternalisasi secara individu lebih sering diangkat berkaitan dengan perempuan. Penerapan pembelajaran bermakna (*lesson learned*) dan faktor keberhasilan dari satu kelompok ke yang lain akan bermanfaat bagi kelompok perempuan dan masyarakat adat, juga berpotensi untuk mengidentifikasi 'titik buta' dan masalah yang sebelumnya tidak dikenali.

Dalam beberapa kasus, faktor keberhasilan bagi perempuan dan masyarakat adat bahkan bisa jadi berkonflik, seperti ketika adat dan praktik suatu kelompok adat menghambat partisipasi efektif perempuan, misalnya larangan berbicara di depan laki-laki, atau bepergian keluar dari kelompoknya. Menavigasi jalan yang kompleks untuk meningkatkan inklusi bagi kedua kelompok ini nampaknya akan membutuhkan proses refleksi dan diskusi untuk menemukan solusi.

LANGKAH SELANJUTNYA

Kami memilih untuk berfokus pada perempuan dan masyarakat adat untuk mengembangkan perangkat untuk meningkatkan inklusi. Namun, pengalaman semua kelompok yang kurang terwakili bersifat unik, dan MSF akan mendapat manfaat dari pemahaman yang lebih baik tentang perlakuan terhadap kelompok, seperti halnya penggembala, keturunan Afrika dan kelompok kasta rendah.

Kami berharap bahwa publikasi dari panduan ini akan mendorong penerapannya pada berbagai MSF, dan kami mengundang MSF tersebut untuk berbagi pengalaman mereka dengan kami sehingga kami dapat belajar dari mereka dan memperbaiki panduan ini.

REFERENSI

Beaman L, Duflo E, Pande R dan Topalova P. 2012. Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India. *Science* 335(6068):582–586. <https://doi.org/10.1126/science.1212382>

Belcher BM, Davel R dan Claus R. 2020. A refined method for theory-based evaluation of the societal impacts of research. *MethodsX* 7:100788. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100788>

Belcher BM dan Hughes K. 2020. Understanding and evaluating the impact of integrated problem-oriented research programmes: Concepts and considerations. *Academic.Oup.Com*. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvaa024>

Broberg M dan Sano HO. 2018. Strengths and weaknesses in a human rights-based approach to international development – An analysis of a rights-based approach to development assistance based on practical experiences. *International Journal of Human Rights* 22(5):664–680. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1408591>

Hamm BI. 2001. A human rights approach to development. *Human Rights Quarterly* 23. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/hurq23&id=1017&div=&collection=>

Hart AK, Milder JC, Estrada-Carmona N, DeClerck FAJ, Harvey CA, Dobie P et al. 2014. Integrated landscape initiatives in practice: assessing experiences from 191 landscapes in Africa and Latin America. In *Climate-smart landscapes: Multifunctionality in practice*. Nairobi: World Agroforestry Centre (ICRAF). 89–101.

[ILO] International Labour Organization. 1989. Indigenous and Tribal Peoples Convention. ILO Convention 169. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

Kusters K, Buck L, de Graaf M, Minang P, van Oosten C dan Zagt R. 2018. Participatory planning, monitoring and evaluation of multi-stakeholder

platforms in integrated landscape initiatives. *Environmental Management* 62(1):170–181. <https://doi.org/10.1007/s00267-017-0847-y>

Molyneux M dan Lazar S. 2003. Doing the rights thing: Rights-based development and Latin American NGOs. Rugby, UK: ITDG Publishing.

Nelson PJ dan Dorsey E. 2018. Who practices rights-based development? A progress report on work at the nexus of human rights and development. *World Development* 104:97–107. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.006>

Nightingale AJ. 2011. Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and environment in Nepal. *Geoforum* 42(2):153–162. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.03.004>

[OHCHR] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2015. Sustainable Development Goals and Human Rights. New York: OHCHR. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SDGS/Pages/The2030Agenda.aspx>

Ooft M. 2008. Indigenous peoples are rights-holders, not only stakeholders in sustainable forest management. *Global Watch* 3:21–35. <http://eds.b.ebscohost.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/eds/detail/detail?vid=0&sid=515e7319-f838-4133-9178-83d7fd7e0e76%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZyZ29wZT1zaXRI#AN=36381842&db=bth>

Rantala S, Vihemäki H, Swallow B dan Jambiya G. 2013. Who gains and who loses from compensated displacement from protected areas? The case of the Derema corridor, Tanzania. *Conservation and Society* 11(2):97–111. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.115721>

Sarmiento Barletti JP dan Larson AM. 2019. The role of multi-stakeholder forums in subnational jurisdictions: Framing literature review for in-depth field research. In *The role of multi-stakeholder forums in subnational jurisdictions: Framing*

literature review for in-depth field research. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
<https://doi.org/10.17528/cifor/007150>

Sarmiento Barletti JP, Larson AM, Cisneros N, Heise N, Liswanti N, Mariño H dan Tamara A. 2020a. How are we doing? A tool to reflect on the process, progress and priorities of your multi-stakeholder forum. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).

Sarmiento Barletti JP, Larson AM, Hewlett C dan Delgado D. 2020b. Designing for engagement: A realist synthesis review of how context affects the outcomes of multi-stakeholder forums on land use and/or land-use change. *World Development* 127:104753
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104753>

Sarmiento Barletti JP, Gonzales Malca G, Arenas Aspilicueta M, Mariño Saavedra H, Larson AM, Heise Vigil N, Cisneros N, Canales Campos W dan Valezuela Quevedo E. 2020c. Cómo vamos? Una herramienta para reflexionar sobre los procesos, los avances y las prioridades de nuestros Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. Documento de Trabajo No. 45. Lima, Peru: SERNANP and Center for International Forestry Research (CIFOR).

Sen A. 2004. Elements of a theory of human rights. *Philosophy and Public Affairs* 32(4):315–356.
<https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2004.00017.x>

Shankor P. 2014. Training Manual on Human Rights and Local Governance. Dhaka, Bangladesh: Concern Universal.

[UN] United Nations. 2016. Leaving no one behind: The imperative of inclusive development. Report on the World Social Situation. New York: UN.

[UN] United Nations. 2015. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). New York: UN.

[UN] United Nations. 2007. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. (A/RES/61/295). New York: UN.

[UN] United Nations. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York: UN.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en

[UN] United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948. 217 A (III). New York: UN.
<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx>

[UNFPA] United Nations Population Fund. 2010. A Human Rights–Based Approach to Programming: Practical Implementation Manual and Training Materials. New York: UFPFA.

[UNPFII] United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. 2020. UNPFII Fact Sheet. New York: UNPFII.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR ARTIKEL YANG DITINJAU UNTUK PANDUAN INI

* Hanya penulis pertama yang disebutkan.

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Adhikari, Sunit	Incentives for community participation in the governance and management of common property resources: The case of community forest management in Nepal	Forest Policy and Economics	2014
Agarwal, Bina	Participatory exclusions, community forestry, and gender: An analysis for South Asia and a conceptual framework	World Development	2001
Agarwal, Bina	Conceptualising environmental collective action: Why gender matters	Cambridge Journal of Economics	2000
Ahebwa, WM	Conservation, livelihoods, and tourism: A case study of the Buhoma-Mukono community-based tourism project in Uganda	Journal of Park and Recreation Administration	2013
Akamani, Kofi	Determinants of the process and outcomes of household participation in collaborative forest management in Ghana: A quantitative test of a community resilience model	Journal of Environmental Management	2015
Alashi, Silas A	National parks and biodiversity conservation: Problems with participatory forestry management	Review of African Political Economy	1999
Ali, Tanvir	Impact of participatory forest management on vulnerability and livelihood assets of forest-dependent communities in northern Pakistan	International Journal of Sustainable Development and World Ecology	2007
Amare, Dagninet	Willingness and participation of local communities to manage communal grazing lands in the Lake Tana Biosphere, Ethiopia	Society and Natural Resources	2017
Andrade, Gustavo SM	Protected areas and local communities: An inevitable partnership toward successful conservation strategies?	Ecology and Society	2012
Appiah, Mark	Co-partnership in forest management: The Gwira-Banso joint forest management project in Ghana	Environment, Development and Sustainability	2001
Barbier, Edward B	Can REDD+ save the forest? The role of payments and tenure	Forests	2012
Barry, Janice	Indigenous state planning as inter-institutional capacity development: The evolution of 'government-to-government' relations in coastal British Columbia, Canada	Planning Theory and Practice	2012

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Bastakoti, Rishi R	Framing REDD+ at national level: Actors and discourse around Nepal's policy debate	Forests	2017
Bayrak, Mucahid Mustafa	Ten years of REDD+: A critical review of the impact of REDD+ on forest-dependent communities	Sustainability (Switzerland)	2016
Bekele, Tsegaye	Do interventions from participatory action research improve livelihood and reduce conflicts over forest resources? A case study from South Central Ethiopia	Small-scale Forestry	2015
Bellfield, Helen	Case study report: Community-based monitoring systems for REDD+ in Guyana	Forests	2015
Biggs, Duan	Developing a theory of change for a community-based response to illegal wildlife trade	Conservation Biology	2017
Boissière, M	Can engaging local people's interests reduce forest degradation in Central Vietnam?	Biodiversity and Conservation	2009
Boissière, Manuel	The feasibility of local participation in measuring, reporting and verification (PMRV) for REDD+	PLOS ONE	2017
Boissière, Manuel	Participating in REDD+ measurement, reporting, and verification (PMRV): Opportunities for local people?	Forests	2014
Bollig, Michael	Fragmentation, cooperation and power: Institutional dynamics in natural resource governance in North-Western Namibia	Human Ecology	2014
Booth, Annie L	'There's a conflict right there': Integrating indigenous community values into commercial forestry in the Tl'azt'en First Nation	Society and Natural Resources	2011
Bottazzi, Patrick	Carbon sequestration in community forests: Trade-offs, multiple outcomes and institutional diversity in the Bolivian Amazon	Development and Change	2014
Bourgoin, Jeremy	Engaging local communities in low emissions land-use planning: A case study from Laos	Ecology and Society	2013
Bridgewater, Peter	Implementing SDG 15: Can large-scale public programs help deliver biodiversity conservation, restoration and management, while assisting human development?	Natural Resources Forum	2015
Burgoyne, Christopher N	'The Mkuze River it has crossed the fence' (1) – Communities on the boundary of the Mkuze protected area	Bulletin of Geography. Socio-economic Series	2014
Butler, JRA	Priming adaptation pathways through adaptive co-management: Design and evaluation for developing countries	Climate Risk Management	2016a
Butler, JRA	Scenario planning to leap-frog the Sustainable Development Goals: An adaptation pathways approach	Climate Risk Management	2016b
Carter, Jane	Recent experience in collaborative forest management: A review paper	CIFOR Occasional Paper	2005
Caruso, Emily	Co-management redux: Anti-politics and transformation in the Ashaninka Communal Reserve, Peru	International Journal of Heritage Studies	2011
Charnley, Susan	Community forestry in theory and practice: Where are we now?	Annual Review of Anthropology	2007

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Chernela, Janet	Limits to knowledge: Indigenous Peoples, NGOs, and the moral economy in the Eastern Amazon of Brazil	Conservation and Society	2014
Chettri, Nakul	Developing forested conservation corridors in the Kangchenjunga landscape, Eastern Himalaya	Mountain Research and Development	2007
Chomba, Susan W	Illusions of empowerment? Questioning policy and practice of community forestry in Kenya	Ecology and Society	2015
Chowdhury, Mohammad Shaheed Hossain	Community attitudes toward forest conservation programs through collaborative protected area management in Bangladesh	Environment, Development and Sustainability	2014
Coombes, Brad L	'Na whenua, na Tuhoē. Ko D.o.C. te partner' - Prospects for comanagement of Te Urewera National Park	Society and Natural Resources	2005
Coutinho-Sledge, Piper	Feminized forestry: The promises and pitfalls of change in a masculine organization	Gender, Work and Organization	2015
Cronkleton, Peter	Co-management in community forestry: How the partial devolution of management rights creates challenges for forest communities	Conservation and Society	2012
Danielsen, Finn	Community monitoring for REDD+: International promises and field realities	Ecology and Society	2013
Das, Nimai	Can gender-sensitive forestry programmes increase women's income? Lessons from a forest fringe community in an Indian province	Rural Society	2011
Davidson-Hunt, Iain J	Anishinaabe adaptation to environmental change in northwestern Ontario: A case study in knowledge coproduction for nontimber forest products	Ecology and Society	2013
Davies, Jocelyn	Innovation in management plans for community conserved areas: Experiences from Australian Indigenous protected areas	Ecology and Society	2013
De La Fuente, T	Do current forest carbon standards include adequate requirements to ensure indigenous peoples' rights in REDD projects?	International Forestry Review	2013
De Lopez, Thanakvaro Thyl	Deforestation in Cambodia: A stakeholder management approach	International Journal of Sustainable Development and World Ecology	2001
De Urioste-Stone, Sandra	Co-Administration in the Zunil Regional Municipal Protected Area, Guatemala	Journal of Park and Recreation Administration	2013
Dean, Erin	Birds of one tree: Participatory forestry and land claims in Tanzania	Human Organization	2011
Delgado-Serrano, Maria del Mar	Local perceptions on social-ecological dynamics in Latin America in three community-based natural resource management systems	Ecology and Society	2015
Dewulf, Art	How issues get framed and reframed when different communities meet: A multi-level analysis of a collaborative soil conservation initiative in the Ecuadorian Andes	Journal of Community and Applied Social Psychology	2004
Dhruba Bijaya, GC	Community forestry and livelihood in Nepal: A review	Journal of Animal and Plant Sciences	2016

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Egunyu, Felicitas	Learning through new approaches to forest governance: Evidence from Harrop-Procter Community Forest, Canada	Environmental Management	2016
Egunyu, Felicitas	Social learning by whom? Assessing gendered opportunities for participation and social learning in collaborative forest governance	Ecology and Society	2015
Everett, Yvonne	Participatory research for adaptive ecosystem management: A case of nontimber forest products	Journal of Sustainable Forestry	2001
Fache, Elodie	Caring for country, a form of bureaucratic participation: Conservation, development, and neoliberalism in Indigenous Australia	Anthropological Forum	2014
Fagerholm, Nora	Landscape characterization integrating expert and local spatial knowledge of land and forest resources	Environmental Management	2013
Funder, Mikkel	Reshaping conservation: The social dynamics of participatory monitoring in Tanzania's community-managed forests	Conservation and Society	2013
Gallemore, Caleb T	Discursive barriers and cross-scale forest governance in Central Kalimantan, Indonesia	Ecology and Society	2014
Galloway, Glenn E	Barriers to sustainable forestry in Central America and promising initiatives to overcome them	Journal of Sustainable Forestry	2007
García, Carolina	Fostering ethno-territorial autonomy: A Colombian case study of community-based conservation of mangroves	Journal of Latin American Geography	2014
Garcia, Claude A	Monitoring, indicators and community-based forest management in the tropics: Pretexts or red herrings?	Biodiversity and Conservation	2008
García-López, Gustavo A	Scaling up from the grassroots and the top down: The impacts of multi-level governance on community forestry in Durango, Mexico	International Journal of the Commons	2013
Gautier, D	The limits and failures of existing forest governance standards in semi-arid contexts	International Forestry Review	2015
Giri, Kalpana	Outmigrating men: A window of opportunity for women's participation in community forestry?	Scandinavian Journal of Forest Research	2010
Goldman, Mara	Partitioned nature, privileged knowledge: Community-based conservation in Tanzania	Development and Change	2003
Guillozet, Kathleen	Forest investments and channels of contestation in highland Ethiopia	African Identities	2014
Gunawan, Budhi	Community dependency on forest resources in West Java, Indonesia: The need to re-involve local people in forest management	Journal of Sustainable Forestry	2004
Gupte, Manjusha	Participation in a gendered environment: The case of community forestry in India	Human Ecology	2004
Haller, Tobias	Who gains from community conservation? Intended and unintended costs and benefits of participative approaches in Peru and Tanzania	Journal of Environment and Development	2008
Hennessey, Ryan	Leveraging community capacity for nature conservation in a rural island context: Experiences from Brier Island, Canada	Landscape Research	2014

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Hodgdon, Benjamin D	Community forestry in Laos	Journal of Sustainable Forestry	2010
Holmes, Ignacia	Early REDD+ implementation: The journey of an Indigenous community in Eastern Panama	Forests	2017
Johansson, KE	Community based forest groups in Eastern and Southern Africa – a study of prospects for capacity improvement	International Forestry Review	2013
Jum, Cyprain	Building broad-based partnership for sustainable forest management: The Model Forest experience in Cameroon	International Journal of Environmental Studies	2007
Karjala, Melanie K	Criteria and indicators for sustainable forest planning: A framework for recording Aboriginal resource and social values	Forest Policy and Economics	2004
Khadka, Manohara	Gender equality challenges to the REDD+ initiative in Nepal	Mountain Research and Development	2014
Klenk, Nicole Lisa	Models of representation and participation in Model Forests: Dilemmas and implications for networked forms of environmental governance involving Indigenous People	Environmental Policy and Governance	2013
Krause, Torsten	Evaluating safeguards in a conservation incentive program: Participation, consent, and benefit sharing in Indigenous communities of the Ecuadorian Amazon	Ecology and Society	2013
Kweka, Demetrius	The context of REDD+ in Tanzania: Drivers, agents and institutions		2015
Lawler, Julia H	A case for Indigenous community forestry	Journal of Forestry	2017
Leventon, Julia	Delivering community benefits through REDD+: Lessons from Joint Forest Management in Zambia	Forest Policy and Economics	2014
Leys, Andrea J	Stakeholder engagement in social learning to resolve controversies over land-use change to plantation forestry	Regional Environmental Change	2011
Lin, Pei-Shan	Towards sustainable community-based natural resource management in the indigenous Meqmegi community in Taiwan: Rethinking impacts of local participation	Natural Resources Forum	2011
Lund, Jens Friis	Are we getting there? Evidence of decentralized forest management from the Tanzanian Miombo woodlands	World Development	2008
Manyena, Siambabala Bernard	Are you serious to ask me about who owns wildlife? Politics of autonomy over wildlife resources in the Zambezi valley, Zimbabwe	Forum for Development Studies	2013
Martin, Adrian	Challenges for participatory institutions: The case of village forest committees in Karnataka, South India	Society and Natural Resources	2001
Matta, Jagannadha	Can environmental services payments sustain collaborative forest management?	Journal of Sustainable Forestry	2006
Matta, Jagannadha	Agency perspectives on transition to participatory forest management: A case study from Tamil Nadu, India	Society and Natural Resources	2005

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Mazur, Robert E	Prospects for enhancing livelihoods, communities, and biodiversity in Africa through community-based forest management: A critical analysis	Local Environment	2008
McDougall, Cynthia L	Engaging women and the poor: Adaptive collaborative governance of community forests in Nepal	Agriculture and Human Values	2013
Memon, P Ali	Contesting governance of indigenous forests in New Zealand: The case of the West Coast Forest Accord	Journal of Environmental Planning and Management	2007
Moritz, C	The Australian monsoonal tropics: An opportunity to protect unique biodiversity and secure benefits for Aboriginal communities	Pacific Conservation Biology	2013
Mulrennan, Monica E	Revamping community-based conservation through participatory research	Canadian Geographer	2012
Musavengane, Regis	Community-based natural resource management: The role of social capital in collaborative environmental management of tribal resources in KwaZulu-Natal, South Africa	Development Southern Africa	2016
Mustalahti, Irmeli	Can REDD+ reconcile local priorities and needs with global mitigation benefits? Lessons from Angai Forest, Tanzania	Ecology and Society	2012
Mutamba, Emmanuel	Community participation in natural resources management: Reality or rhetoric?	Environmental Monitoring and Assessment	2004
Mutune, Jane M	What rights and benefits? The implementation of participatory forest management in Kenya: The case of Eastern Mau Forest Reserve	Journal of Sustainable Forestry	2017
Mvondo, Samuel Assembe	An assessment of social negotiation as a tool of local management: A case study of the Dimako Council Forest, Cameroon	Scandinavian Journal of Forest Research	2004
Mvondo, Samuel Assembe	Decentralized forest resources and access of minorities to environmental justice: An analysis of the case of the Baka in southern Cameroon	International Journal of Environmental Studies	2006
Nawir, AA	Commercial community tree-growing inside state forests: An economic perspective from eastern Indonesia	International Forestry Review	2013
Newton, Adrian C	Forest landscape restoration in the drylands of Latin America	Ecology and Society	2012
Niedziałkowski, Krzysztof	Participation and protected areas governance: The impact of changing influence of local authorities on the conservation of the Białowieża Primeval Forest, Poland	Ecology and Society	2012
Nijnik, Maria	Afforestation and reforestation projects in South and South-East Asia under the Clean Development Mechanism: Trends and development opportunities	Land Use Policy	2013
Nuggehalli, Roshni K	Motivating factors and facilitating conditions explaining women's participation in co-management of Sri Lankan forests	Forest Policy and Economics	2009
Ogbaharya, Daniel	Community-based natural resources management in Eritrea and Ethiopia: Toward a comparative institutional analysis	Journal of Eastern African Studies	2010

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Olivier, Lennox	Bossiedokters and the challenges of nature co-management in the Boland area of South Africa's Western Cape	Journal of Contemporary African Studies	2013
Ooft, Max	Indigenous peoples are rights-holders, not only stakeholders in sustainable forest management	Global Watch	2008
Oyono, Phil René	The social and organisational roots of ecological uncertainties in Cameroon's forest management decentralisation model	The European Journal of Development Research	2004
Padwe, Jonathan	Participatory conservation in the Condor Bioserve, Ecuador	Journal of Sustainable Forestry	2004
Parkins, John R	Forest governance as neoliberal strategy: A comparative case study of the Model Forest program in Canada	Journal of Rural Studies	2016
Pasgaard, Maya	Lost in translation? How project actors shape REDD+ policy and outcomes in Cambodia	Asia Pacific Viewpoint	2015
Pasgaard, Maya	Double inequity? The social dimensions of deforestation and forest protection in local communities in Northern Cambodia	Austrian Journal of South-East Asian Studies / Österreichische Zeitschrift für Südostasienwissenschaften	2013
Phiri, M	Local community perception of joint forest management and its implications for forest condition: The case of Dambwa Forest Reserve in southern Zambia	Southern Forests: A Journal of Forest Science	2012
Pokharel, Ridish K	Good governance assessment in Nepal's community forestry	Journal of Sustainable Forestry	2013
Pollini, Jacques	Carbon sequestration for linking conservation and rural development in Madagascar: The case of the Vohidrazana-Mantadia Corridor Restoration and Conservation Carbon project	Journal of Sustainable Forestry	2009
Potts, Ruth	A study of governance arrangements for land use and natural resource management planning in Cape York Peninsula	Australian Geographer	2015
Poudel, Mohan	Social equity and livelihood implications of REDD+ in rural communities: A case study from Nepal	International Journal of the Commons	2015
Poudel, Mohan	REDD+ and community forestry: Implications for local communities and forest management – a case study from Nepal	International Forestry Review	2014
Purnomo, Herry	Communicative action to level the playing field in forest plantations in Indonesia	Journal of Sustainable Forestry	2014
Reed, Maureen G	Linking gender, climate change, adaptive capacity, and forest-based communities in Canada	Canadian Journal of Forest Research	2014
Reed, Maureen G	Guess who's (not) coming for dinner: Expanding the terms of public involvement in sustainable forest management	Scandinavian Journal of Forest Research	2010
Rishi, Parul	Joint forest management in India: An attitudinal analysis of stakeholders	Resources, Conservation and Recycling	2007

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Rist, Lucy	Ecological knowledge among communities, managers and scientists: Bridging divergent perspectives to improve forest management outcomes	Environmental Management	2016
Roth, Robin J	'Fixing' the forest: The spatiality of conservation conflict in Thailand	Annals of the Association of American Geographers	2008
Saito-Jensen, Moeko	Social and environmental tensions: Affirmative measures under REDD+ carbon payment initiatives in Nepal	Human Ecology	2014
Sanders, Wendy Hinrichs	The Great Lakes Forest Alliance building bridges to raise collective wisdom across governments and institutions	Journal of Sustainable Forestry	2001
Sattler, Claudia	Multilevel governance in community-based environmental management: A case study comparison from Latin America	Ecology and Society	2016
Simane, Belay	The sustainability of community-based adaptation projects in the Blue Nile Highlands of Ethiopia	Sustainability (Switzerland)	2014
Snyder, Katherine A	Participation and performance: Decentralised planning and implementation in Ethiopia	Public Administration and Development	2014
Songi, Ondotimi	Defining a path for benefit sharing arrangements for local communities in resource development in Nigeria: The foundations, trusts and funds (FTFs) model	Journal of Energy & Natural Resources Law	2015
Staddon, Sam C	Exploring participation in ecological monitoring in Nepal's community forests	Environmental Conservation	2015
Stiem, L	Exploring the impact of social norms and perceptions on women's participation in customary forest and land governance in the Democratic Republic of Congo—implications for REDD+	International Forestry Review	2016
Sunam, Ramesh K	Community forestry and the threat of recentralization in Nepal: Contesting the bureaucratic hegemony in policy process	Society and Natural Resources	2013
Sutta, HE	REDD+ piloting process in the Zanzibar Islands, Tanzania: The assessment of the community's perceptions and attitudes	Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management	2014
Szulecka, Julia	Local institutions, social capital and their role in forest plantation governance: Lessons from two case studies of smallholder plantations in Paraguay	International Forestry Review	2014
Tai, Hsing Sheng	Cross-scale and cross-level dynamics: Governance and capacity for resilience in a social-ecological system in Taiwan	Sustainability (Switzerland)	2015
Tessema, Mekbeb E	Community attitudes toward wildlife and protected areas in Ethiopia	Society and Natural Resources	2010
Thoms, Christopher A	Co-constructing community forests in Nepal: Mutual constraint in a transnational aid network	Journal of Natural Resources Policy Research	2011
Tsanga, R	What is the role for forest certification in improving relationships between logging companies and communities? Lessons from FSC in Cameroon	International Forestry Review	2014

Penulis pertama	Judul	Jurnal	Tahun
Ulybina, Olga	Participatory forest management: The experience of foreign-funded programmes in the Kyrgyz Republic	Environmental Policy and Governance	2015
Usongo, Leonard	Participatory approaches towards forest conservation: The case of Lobéké National Park, South east Cameroon	International Journal of Sustainable Development and World Ecology	2004
Wagle, Radha	Examining Nepalese forestry governance from gender perspectives	International Journal of Public Administration	2017
Wambede, Nabalegwa	Effectiveness of transboundary collaborative conservation in Virunga national parks	Indonesian Journal of Geography	2013
Watts, Scotney	Institutional constraints on interactive community participation in forest conservation in Mozambique	Journal of Sustainable Forestry	2008
Wells, Michael P	Protected area management in the tropics: Can we learn from experience?	Journal of Sustainable Forestry	2003
West, Thales AP	Indigenous community benefits from a de-centralized approach to REDD+ in Brazil	Climate Policy	2016
Westholm, L	Fruits from the forest and the fields: Forest conservation policies and intersecting social inequalities in Burkina Faso's REDD+ program	International Forestry Review	2016
Wilshusen, PR	By, for and of the people: The development of two community-managed protected areas in Oaxaca, Mexico	Journal of Sustainable Forestry	2002
Wilson, Randall K	Collaboration in context: Rural change and community forestry in the Four Corners	Society and Natural Resources	2006
Wyborn, Carina	Collaboration and nested environmental governance: Scale dependency, scale framing, and cross-scale interactions in collaborative conservation	Journal of Environmental Management	2013
Xu, Jianchu	Decentralisation and accountability in forest management: A case from Yunnan, Southwest China	The European Journal of Development Research	2004
Zulu, Leo Charles	Community forest management in Southern Malawi: Solution or part of the problem?	Society and Natural Resources	2008

LAMPIRAN 2. DAFTAR ORANG YANG DIWAWANCARAI YANG DIKONSULTASIKAN UNTUK PANDUAN INI

Tabel 4. Daftar orang yang diwawancarai di Afrika

Nama	Laki-laki/ Perempuan	Organisasi	Negara
Asiku Micah	Laki-laki	Community Development and Conservation Agency (CODECA)	Uganda
Abraham Nkuruna	Laki-laki	Narok County Natural Resource Network (NCNRN)	Kenya
Adam Ole Mwarabu	Laki-laki	Parakuiyo Pastoralists Indigenous Community Development Organisation (PAICODEO)	Tanzania
Albert Katako	Laki-laki	Civic Response	Ghana
Anne Kamau, Rahma Kivugo	Perempuan	Mikoko Pamoja (Swahili word translated Mangroves Together)	Kenya
Bernard Baha	Laki-laki	Tanzania Land Alliance (TALA)	Tanzania
Cécile Bibiane Ndjebet	Perempuan	African Women's Network for Community Management of Forests (REFACOF)	Cameroon
Concepta Mukasa	Perempuan	Association of Uganda Professional Women in Agriculture and Environment (AUPWAE)	Uganda
Daniel Kobei	Laki-laki	Ogiek Peoples Development program (OPDP)	Kenya
Daniel Ouma	Laki-laki	Tanzania Natural Resource Forum (TNRF)	Tanzania
Gerald Ngatia	Laki-laki	National Alliance of Community Forest Associations (NACOFA)	Kenya
John Leckie	Laki-laki	DAI	Washington DC based, works in Ethiopia and Tanzania
Zake Joshua	Laki-laki	Environment Alert	Uganda
Steven Cole	Laki-laki	International Institute of Tropical Agriculture (IITA)	Tanzania
Suzane Irau	Perempuan	Land and Equity Movement Uganda (LEMU)	Uganda
Tereza Getahun	Perempuan	Pastoralist Forum Ethiopia (PFE)	Ethiopia

Tabel 5. Daftar orang yang diwawancarai di Amerika Latin

Nama	Laki-laki/ Perempuan	Organisasi	Negara
Álvaro Acevedo	Laki-laki	Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)	Colombia
Breny Herrera	Perempuan	Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC)	El Salvador, Guatemala, Nicaragua
Eileen Mairena Cunningham	Perempuan	Organización de Mujeres Indígenas Wangki Tangni	Nicaragua
Fany Kuiru Castro	Perempuan	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)	Colombia
Gustavo Sánchez	Laki-laki	Mexican Network of Rural Forest Organization (RED MOCAF)	Mexico
Judith Walcott	Perempuan	United Nations REDD+ (ONUREDD+)	Latin America
Luisa Lozano	Perempuan	Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE)	Ecuador
María Alejandra Rodríguez Acha	Perempuan	Fondo Feminista Joven FRIDA	Peru
Margarita Florez	Perempuan	Environment and Society Association	Colombia
María Teresita Chinchilla Miranda	Perempuan	Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)	Guatemala
Melania Canales	Perempuan	National Organization of Indigenous, Andean and Amazonian Women of Peru (ONAMIAP)	Peru
Telma Taurepang	Perempuan	Union of Indigenous Women of the Brazilian Amazon (UMIAB)	Brazil
Valeria Urbina	Perempuan	Law, Environment and Natural Resources (DAR)	Peru
Vilma Mendoza	Perempuan	National Confederation of Indigenous Women of Bolivia (CNAMIB)	Bolivia
Yohanka Valdes	Perempuan	Gender Justice and Women's Rights Program, Oxfam	Cuba

Tabel 6. Daftar orang yang diwawancarai di Asia

Nama	Laki-laki/ Perempuan	Organisasi	Negara
Andhika Vega Praputra	Laki-laki	Samdhana Institute	Southeast Asia, Indonesia, Philippines
Bharati Pathak	Perempuan	Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN Nepal)	Nepal
Kevin Jeanes, Chanthaphone Thammavong, Sitthideth Abhay, Pany Vanmanivong	Laki-laki/ Perempuan	Climate Change Adaptation in Wetlands Areas in Lao PDR (CAWA) Project, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), funded by the Global Environment Facility (GEF)	Lao PDR
Dharm Raj Joshi	Laki-laki	International Land Coalition, NES Nepal	Nepal
Dian Ekowati	Perempuan	CIFOR	Indonesia
Ellen Dictaan	Perempuan	Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education)	
Gamma Galudra	Laki-laki	The Center for People and Forests (RECOFTC)	Indonesia
Ishan Agrawal	Laki-laki	Foundation for Ecological Security (FES)	India
Ly Thi Minh Hai	Perempuan	The Center for People and Forests (RECOFTC)	Vietnam
Mia Siscawati	Perempuan	University of Indonesia	Indonesia
Pasang Dolma	Perempuan	Center for Indigenous Peoples' Research and Development (CIPRED) Nepal	Nepal
Pratiti Priyadarshini	Perempuan	Foundation for Ecological Security (FES)	India
Reonaldus Paembonan	Laki-laki	Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI)	Indonesia
Shambu Dungal	Laki-laki	The Center for People and Forests (RECOFTC)	Nepal
Subekti Rahayu	Laki-laki	World Agroforestry Centre (ICRAF)	Indonesia
Swapna Sarangi	Perempuan	Foundation for Ecological Security (FES)	India
Tini Gumartini	Perempuan	World Bank	Indonesia
Tran Nhat Lam Duyen	Perempuan	School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University, Hanoi (VNU)	Vietnam

Tabel 7. Daftar organisasi yang bekerja secara internasional/global

Nama	Laki-laki/ Perempuan	Organisasi	Negara
Agnieszka Kroskowska	Perempuan	HELVETAS	Global
Alain Frechette	Laki-laki	Rights and Resources Initiative	Global
David Alejandro Rubio	Laki-laki	International Land Coalition	Global
Elisabetta Cangelosi	Perempuan	International Land Coalition	Global
Joao Montalvao	Laki-laki	World Bank' Africa Gender Innovation Lab	Global
Margaux Granat	Perempuan	EnGen Collaborative	Global
Mathurin Zida	Laki-laki	CIFOR	Global
Natalie Elwell	Perempuan	World Resources Institute	Global
Patricia Van de Velde	Perempuan	World Bank, Food and Agriculture Practice	Global
Ruth Meinzen-Dick	Perempuan	International Food Policy Research Institute	Global
Sylvia Cabus	Perempuan	U. S. Agency for International Development (USAID)	Global

BERTINDAK DENGAN TEPAT

Panduan ini menjelaskan bagaimana untuk mengoperasionalkan inklusi perempuan, masyarakat adat dan kelompok kurang terwakili lainnya dalam forum multipihak (MSF).

MSF telah dipromosikan untuk menyatukan beragam konstituen agar dapat berbagi gagasan dan pendapat dan untuk merumuskan keputusan dengan cara yang lebih terbuka dan berkesetaraan tentang berbagai isu dan skala, dari negosiasi perubahan iklim global sampai keputusan pemanfaatan lahan lokal, namun para praktiknya bukti menunjukkan bahwa perempuan dan masyarakat adat sering kali kurang terwakili atau kurang berpengaruh dalam inisiatif-inisiatif multipihak. Bertindak dengan tepat mengatasi tantangan ini dengan menyediakan beberapa perangkat yang dirancang untuk mengoperasionalkan inklusi pada titik-titik pemicu yang spesifik yang suatu aksi akan bekerja paling efektif.

**RIGHTS +
RESOURCES**

Penelitian ini sebagian didukung oleh *Rights and Resources Initiative* (RRI). *Rights and Resources Initiative* adalah koalisi global dengan lebih dari 200 organisasi yang didedikasikan untuk memajukan hak atas lahan hutan bagi masyarakat adat, penduduk lokal dan perempuan pedesaan. Para anggota memanfaatkan kekuatan, keahlian dan jangkauan geografis satu sama lain untuk mencapai solusi secara lebih efektif dan efisien. RRI memanfaatkan kekuatan koalisi global untuk memperkuat suara masyarakat lokal, dan secara proaktif melibatkan pemerintah institusi multilateral dan aktor sektor swasta untuk mengadopsi reformasi kelembagaan dan pasar yang mendukung realisasi hak. Dengan meningkatkan pemahaman strategis tentang ancaman dan peluang global yang muncul dari hak atas lahan dan sumber daya yang tidak pasti, RRI mengembangkan dan mempromosikan berbagai pendekatan berbasis hak untuk bisnis dan pembangunan, serta mempercepat solusi yang efektif untuk meningkatkan reformasi tenurial pedesaan dan memperkuat tata kelola yang berkelanjutan. RRI dikoordinasikan oleh *Rights and Resources Group*, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Washington, DC. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org

**RESEARCH
PROGRAM ON
Policies,
Institutions,
and Markets**
Led by IFPRI

Program penelitian CGIAR tentang Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (*Policies, Institutions, and Markets*, PIM) memimpin penelitian berorientasi aksi untuk memperlengkapi pembuat keputusan dengan bukti yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pangan dan pertanian yang lebih melayani kepentingan produsen dan konsumen yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan. PIM menggabungkan sumber daya pusat-pusat CGIAR dan berbagai mitra internasional, regional dan nasional. Program ini dipimpin oleh Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). www.pim.cgiar.org

**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Penelitian ini juga didukung sebagian oleh Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetik pohon di seluruh bentang alam, dari hutan hingga pertanian. CIFOR memimpin CRP-FTA dalam kemitraan dengan *Bioversity International*, CATIE, CIRAD, Pusat Pertanian Tropis Internasional (CIAT) dan *World Agroforestry* (ICRAF).

**GENDER
Platform**

Pekerjaan ini dilakukan di bawah platform CGIAR GENDER, dengan dukungan Kontribusi Dana Perwalian CGIAR. www.cgiar.org/funders

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, memperkuat kapasitas para mitra, dan secara aktif terlibat dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk menginformasikan kebijakan dan praktik yang berpengaruh pada hutan dan masyarakat. CIFOR adalah Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor-kantor di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru; dan Bonn, Jerman.